



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Telp. 7054555 – 7055627 – 7054374
P A D A N G



LAPORAN AKHIR SUB KEGIATAN KOOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2024

PADANG, DESEMBER 2024

BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur disampaikan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Laporan Tahunan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur telah selesai dilaksanakan.

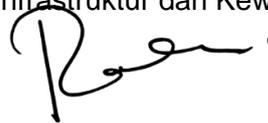
Laporan ini berisikan uraian pelaksanaan kegiatan, permasalahan dan capaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Dengan disusunnya Laporan Akhir ini, diharapkan dapat memberikan gambaran, masukan dan manfaat dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur untuk perbaikan pelaksanaan di tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan Laporan Akhir ini telah dilakukan sebaik mungkin, namun disadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam laporan ini. Untuk itu, kami mohon saran dan kritikan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Padang, Desember 2024

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan



Rahmi Laila. S. Si. Msi
NIP. 19810119 200604 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR HUKUM	1
1.3. TUJUAN KEGIATAN	3
1.4. HASIL KEGIATAN	3
1.5. LINGKUP KEGIATAN.....	3
1.6. SISTEMATIKA PENULISAN.....	1
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	3
SINERGITAS DAN HARMONISASI DOKUMEN PERENCANAAN SEKTOR INFRASTRUKTUR ANTAR PERANGKAT DAERAH, PUSAT DAN KABUPATEN/KOTA	5
BAB III PERMASALAHAN	62
BAB IV PENUTUP	63
4.1. KESIMPULAN	63
4.2. REKOMENDASI.....	63

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan merupakan hal penting untuk pencapaian tujuan pembangunan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan (*sustainable development*). Perencanaan merupakan salah satu dari aspek manajemen disamping pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*), sedangkan pembangunan secara umum menganut tiga paradigma, yaitu pertumbuhan (*growth*), perbaikan (*improvement*), dan perubahan (*change*). Dengan demikian pada dasarnya perencanaan pembangunan adalah upaya untuk eksplorasi sumberdaya secara optimal untuk mencapai pertumbuhan, perbaikan dan perubahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, Pemerintah telah mengatur tata cara perencanaan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pada undang – undang tersebut dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) dengan periode 1 (satu) tahun.

Dalam proses perencanaan dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk mendukung perencanaan. Disamping itu juga harus mengakomodir kebijakan pusat serta mempertimbangkan kebijakan ditingkat Kabupaten/Kota, dengan demikian diharapkan terwujud sinkronisasi, kesesuaian dan konsistensi perencanaan ditingkat pusat dan daerah.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan di sektor infrastruktur dan pengembangan wilayah maka dilaksanakan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur. Melalui sub kegiatan ini diharapkan dapat menginventarisir permasalahan, isu strategis serta pengumpulan data dan informasi serta peningkatan sinergitas proses perencanaan dan sumber pendanaan lainnya seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), APBN, Hibah dan sebagainya.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
3. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang;
4. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79)
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;

1.3. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur adalah :

1. Mewujudkan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan lingkup bidang infrastruktur antar perangkat daerah, pusat dan kabupaten/kota;
2. Mendukung perencanaan dan program kerja dari sumber pendanaan APBN dan sumber pendanaan lainnya
3. Mendukung ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan infrastruktur.

1.4. HASIL KEGIATAN

Hasil dari pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur adalah :

1. Meningkatnya sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan sektor infrastruktur antar perangkat daerah, pusat dan kabupaten/kota;
2. Terlaksananya Rapat Koordinasi terkait isu strategis lingkup infrastruktur antar perangkat daerah, pusat dan kabupaten/kota;
3. Terwujudnya sinergitas sumber pendanaan lainnya seperti APBN, Hibah dan sebagainya.

1.5. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Daerah Bidang Infrastruktur :

1. Melaksanakan rapat tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon tahun 2023.
2. Melaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Rapat Kerja Evaluasi DAK Fisik Infrastruktur PUPR TA. 2023
3. Melaksanakan rapat penanganan danau prioritas nasional
4. Melaksanakan rapat sinergitas keterpaduan infrastruktur
5. Rapat Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur antar perangkat daerah, pusat dan kabupaten/kota
6. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan infrastruktur.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian Pendahuluan berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika penulisan

2. BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

Pada bagian ini dipaparkan pelaksanaan kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

3. BAB III PERMASALAHAN

Bagian ini menjelaskan tentang indentifikasi permasalahan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

4. BAB IV PENUTUP

Penutup berisikan kesimpulan

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

SINERGITAS DAN HARMONISASI DOKUMEN PERENCANAAN SEKTOR INFRASTRUKTUR ANTAR PERANGKAT DAERAH, PUSAT DAN KABUPATEN/KOTA

1. Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan PHJD Provinsi Sumatera Barat, Jum'at 5 Januari 2024

Rapat ini dilaksanakan sebagai salah bentuk pertanggungjawaban Provinsi Sumatera Barat yang telah menerima Dana Program Hibah Jalan Daerah dari Tahun 2020 – 2022 dan sesuai dengan Program Management Manual/PMM Amandemen 4 poin 5.5 (subpoin 5.5.3) menyebutkan bahwa Direktorat Dana Transfer Khusus DJPK Kementerian Keuangan dan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana hibah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Sesuai dengan surat Sekretariat Jenderal Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM0102.SF.2/01 tanggal 2 Januari 2024 perihal Penyampaian Laporan Kegiatan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) disampaikan bahwa penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan PHJD Provinsi / Kabupaten diterima Sekretariat Jenderal Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah paling lambat tanggal 13 Januari 2024

Hasil Rapat :

Bappeda (Kabid Infracwil)

Berdasarkan PMM PHJD Amandemen 4 Poin 5.5 (Subpoin 5.5.3) menyebutkan bahwa Direktorat Dana Transfer Khusus DJPK Kementerian Keuangan dan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana hibah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Melalui surat dari Sekretariat Jenderal Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM0102.SF.2/01 tanggal 2 Januari 2024 perihal Penyampaian Laporan Kegiatan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) disampaikan bahwa penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan PHJD Provinsi / Kabupaten diterima Sekretariat Jenderal Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah paling lambat tanggal 13 Januari 2024.

Untuk menyikapi hal ini, maka perlu dilakukan koordinasi dengan seluruh SKPD pengelola dana PHJD Prov. Sumatera Barat agar penulisan dan penyelesaian penyusunan laporan pelaksanaan PHJD Prov. Sumatera Barat dapat terrealisasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Untuk itu diminta tanggapan dan masukan dari masing-masing SKPD pengelola dana PHJD terkait penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan PHJD tersebut.

Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat

Merujuk pada format penulisan laporan yang disampaikan dalam surat PFID dapat disampaikan bahwa untuk informasi penulisan Bab I dapat memanfaatkan informasi yang terdapat pada proposal awal pengajuan anggaran PHJD. Untuk itu, Dinas BMCKTR akan menelusuri kembali file proposal tersebut, mengingat beberapa personil yang menangani pengajuan usulan PHJD telah pindah ke bidang lain.

Untuk Sub Bab 1.3.2. Dasar Hukum Daerah Terpilih Sebagai Penerima Alokasi PHJD, dibutuhkan SK penetapan Provinsi Sumatera Barat sebagai daerah penerima alokasi anggaran PHJD. Dan untuk Sub Bab 1.5. Peta Koridor Lokasi Kegiatan PHJD, Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat akan membuat peta koridor lokasi kegiatan PHJD ini. Karena selama ini belum pernah dibuat peta koridor untuk kegiatan PHJD, layalnya penyusunan peta koridor dalam pengajuan DAK Jalan.

Untuk Sub Bab 2.2.2, Kondisi eksisting yang dinarasikan apakah kondisi eksisting saat ini atau sebelum dilakukan penanganan?

Untuk Sub Bab 2.3. Informasi Detail Pekerjaan Penanganan Per-Ruas PHJD akan menarasikan terkait bentuk penanganan yang dilakukan serta progress peningkatan kemantapan jalan yang telah ditangani dengan anggaran PHJD. Dan untuk Bab 2.4. akan menampilkan foto dokumentasi per ruas penanganan PHJD pra dan pasca penanganan.

Bab III

Untuk Bab III Dinas BMCKTR akan menyajikan informasi terkait pelaksanaan Provincial / Kabupaten Road Management System (PKRMS) dan pelatihan yang telah dilaksanakan. Untuk pelaksanaan Gender Equality Social Inclusion (GESI), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membuat Surat Pernyataan Gubernur tentang komitmen pemerintah Provinsi / Kabupaten untuk menerapkan pendekatan kesetaraan Gender dalam Program PHJD. Untuk Konsultasi Publik yang dilakukan Dinas BMCKTR melibatkan seluruh aspek, tidak hanya GESI. Selain itu juga terdapat Rencana Aksi GESI yang disepakati SKPD terkait. Selain itu Dinas Pariwisata juga melakukan pelatihan dan Bimtek yang mengandung unsur GESI dan perkuatan unsur GESI dalam narasinya.

Bappeda (Kabid Infracwil)

Untuk Proposal usulan PHJD tahun 2019 disusun oleh Dinas BMCKTR saat kabid Bina Marga Bpk. Dedi Rinaldi dan fungsional Tommy. Untuk Peta koridor KSPN Mandeh untuk disiapkan oleh BMCKTR sesuai dengan peta koridor usulan DAK Jalan. Untuk foto dokumentasi per ruas dapat disandingkan dokumentasi sebelum dan setelah penanganan PHJD. Sementara untuk GESI dikerjakan oleh Dinas BMCKTR, Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan.

Dinas Pariwisata

Untuk Sub Bab 3.4, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat telah memiliki SK penetapan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPDA) dan telah dilakukan revisi pada tahun 2019. Selama pelaksanaan PHJD, Dinas Pariwisata juga telah melakukan sosialisasi dan konsultasi publik kepada Pokdarwis di Kawasan penanganan PHJD. Untuk data baseline jumlah wisatawan telah tersedia berupa data kunjungan wisata Kota Padang dan Kab. Pesisir Selatan.

Bappeda (Kabid Infracwil)

Untuk SK Penetapan Pokdarwis, yang disajikan adalah SK Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan output PHJD saat verifikasi. Selain melampirkan bukti dukung OPD penerima manfaat PHJD juga harus menyampaikan dalam format laporan berupa narasi yang harus dituangkan dalam laporan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat telah membentuk Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) melalui SK Gubernur Sumbar. Selain itu juga telah tersedia website FLLAJ yang independen. Untuk SOP FLLA terdapat dua jenis SOP yang mungkin untuk disampaikan yaitu terkait Rapat FLLAJ serta tindaklanjut atas laporan masyarakat pada Website FLLAJ. Untuk Hasil Pembuatan Peta Lokasi Rawan Kecelakaan / Blackspot Berbasis SIG juga telah tersedia.

Bappeda (Kabid Infracwil)

Yang perlu dinarasikan pada Bab FLLAJ diantaranya kondisi ruas jalan, Fasilitas keselamatan jalan, rapat Forum, laporan masyarakat, serta rekomendasi dan tindak lanjut FLLAJ. Dan untuk SOP yang disajikan adalah Rapat Forum FLLAJ dan tindak lanjut laporan masyarakat dalam website FLLAJ.

Untuk Bab 4, diharapkan masukan dan narasi dari seluruh OPD penerima manfaat PHJD.

BPKAD

Secara umum, proses keuangan baik dalam penganggaran, pencairan dana maupun proses reimbursement tidak mengalami permasalahan yang berarti.

Bappeda (Kabid Infracwil)

Mengingat batas waktu penyampaian laporan ke Kementerian PUPR adalah tanggal 13 Januari 2024, maka diharapkan kepada seluruh SKPD pengelola dana PHJD telah dapat menyampaikan tulisan / laporan paling lambat tanggal 9 Januari 2024 ke Bappeda untuk dikompilasi dengan ukuran kertas A4, Huruf Bookman Old Style 12, dan spasi 1,5. Setelah dilakukan kompilasi, maka akan dilakukan rapat pembahasan hasil penulisan laporan pada tanggal 11 Januari 2024.



2. Rapat Pembahasan Pembangunan New Tunnel Alignment pada Jalan Tol Payakumbuh-Pangkalan, 2 Februari 2024

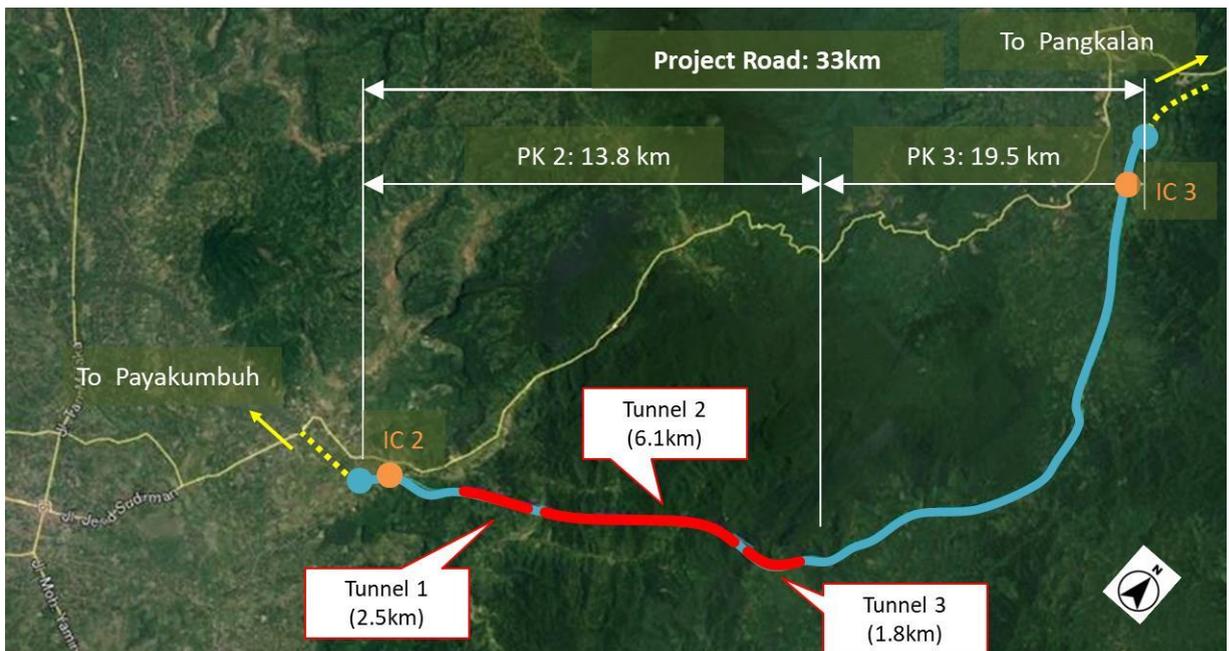
Hasil Rapat:

Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Infracwil Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang diikuti oleh Konsultan Japan International Cooperation Agency (JICA), Bappeda Kota Padang, Bappeda Kota Bukittinggi dan Bappeda Kota Payakumbuh. Dalam sambutan awal, Kepala Bidang Infracwil menyampaikan bahwa dalam kesempatan ini Bappeda Provinsi Sumatera Barat memfasilitasi permintaan dari pihak JICA dalam rangka menjangkau informasi yang seluas-luasnya terkait trend sosial ekonomi yang relevan di wilayah perencanaan yang diperlukan untuk analisis ekonomi dan finansial dalam rencana pembangunan New Tunnel Alignment pada Jalan Tol Payakumbuh-Pangkalan. Kegiatan diawali dengan paparan dari Konsultan JICA, Yushiko Katto.

Dalam paparannya beliau menyampaikan bahwa JICA merupakan organisasi dari Pemerintah Jepang yang nantinya akan menjadi donatur dalam proyek pembangunan New Tunnel Alignment pada Jalan Tol Payakumbuh-Pangkalan. Organisasi ini memiliki beberapa tenaga ahli yang akan melakukan survey terkait rencana pembangunan NTA

tersebut. Dan dalam kesempatan ini, Bpk. Yushiko Katto akan melakukan survey terkait bidang Sosial Ekonomi. Selain memaparkan terkait rencana pembangunan NTA, pihak JICA juga berharap ada masukan dan informasi dari Pemerintah Daerah terkait kondisi Sosial Ekonomi di lapangan. Sehingga nantinya proyek kerja sama ini dapat memberikan keuntungan bagi kedua negara. Untuk itu, pihak JICA berharap Pemerintah daerah dapat memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya tentang rencana masa depan dari masing-masing daerah baik secara lisan maupun tertulis.

Mr. Katto menjelaskan bahwa terowongan yang akan dibangun di jalan Tol Payakumbuh-Pangkalan ini merupakan terowongan yang sangat Panjang. Ruas jalan ini merupakan cabang dari jalur Trans Sumatera yang menghubungkan antara Kota Pekanbaru ke Padang. Dimana untuk jalan yang ada saat ini memiliki Panjang 320 km yang membutuhkan waktu tempuh 8 jam bahkan lebih. Nantinya jalan tol yang dibangun ini memiliki Panjang 240 km dengan waktu tempuh hanya 3 jam. Dengan terhubungnya jalan Tol ini, diyakini akan berdampak signifikan terhadap perekonomian kedua daerah. Namun pelaksanaan pekerjaan Tol ini membutuhkan waktu pengerjaan yang lama, khususnya pada segmen Payakumbuh-Pangkalan sepanjang 33 Km. Karena pada segmen ini terdapat pembangunan 3 buah terowongan dengan panjang masing-masing Terowongan 1 sepanjang 2,5 Km, Terowongan 2 sepanjang 6,1 Km dan Terowongan 3 sepanjang 1,8 Km. Nantinya pekerjaan segmen ini akan dibagi menjadi dua paket dimana paket I sepanjang 13,8 Km yang terdiri dari 3 terowongan dan paket II sepanjang 19,5 Km.



Setelah selesai pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru ini, diperkirakan setiap harinya akan dilewati 10.000 kendaraan per hari. Dan dalam 10 tahun operasionalnya diperkirakan jalan tol ini akan dilewati 15.000 kendaraan per hari dengan asumsi 70% kendaraan melewati jalan tol. Selain itu, pada segmen Payakumbuh-Pangkalan sepanjang 33 km ini hanya membutuhkan waktu tembus 27 menit. Ini jauh lebih hemat

jika dibandingkan dengan jarak dan waktu tempuh saat ini yang bisa mencapai 130 menit dengan Panjang 48 Km.

Dalam kesempatan ini, rapat dilanjutkan dengan paparan dari Kepala Bidang Infracwil. Dimana dalam paparannya Ibu Rahmi menyampaikan gambaran umum Provinsi Sumatera Barat mencakup Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Gini ratio, dan PDRB Perkapita. Selain itu, juga disampaikan beberapa Arah Pembangunan Sumatera Barat berdasarkan RTRW Nasional yang dibagi atas 3 arah pembangunan yaitu:

1. Kawasan Strategis Nasional seperti Hutan Lindung Bukit Batabuah, Danau Maninjau, Taman Nasional Kerinci Seblat dan Perbatasan Negara di Laut Lepas
2. Kawasan Andalan seperti: Padang Pariaman, Agam-Bukittinggi, Mentawai, Solok dan Andalan Laut Siberut
3. Sistem Perkotaan Nasional seperti: Kawasan Perkotaan PALAPA, Pariaman, Muara Siberut, Bukittinggi, Solok, Payakumbuh dan Tua Pejat

Sementara jika merujuk pada RTRW Provinsi Sumatera Barat maka ada beberapa arah pembangunan kedepannya diantaranya:

1. Kawasan Strategis Provinsi seperti: Kawasan Indarung, Teluk Bayur, Bungus, Mandeh, Kawasan Industri, Kawasan Minapolitan, Kawasan Perbatasan Provinsi, Kawasan Batusangkar, Kawasan Sianik, Kawasan Danau Singkarak, Kawasan Danau Maninjau, Kawasan Danau Diatas Danau Dibawah dan Kawasan Silaping.
2. Kawasan Metro Politas seperti: Kota Padang, Lubuk Alung, Kota Pariaman, Arosuka, Kota Solok dan Painan
3. Sistem Perkotaan seperti: Kota Padang, Pariaman, Muara Siberut, Bukittinggi, Sawahlunto, Payakumbuh, Pulau Punjung, Tapan dan Simpang Empat.

Dalam hal penetapan proyek prioritas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan beberapa proyek prioritas kedepannya diantaranya:

1. Lanjutan Pembangunan Sisi Laut dan Darat Pelabuhan Teluk Tapang
2. Lanjutan Pembangunan Trans Mentawai
3. Penuntasan Jalan Tol Padang-Pekanbaru. Khususnya segmen Sicincin-Bukittinggi, Bukittinggi-Payakumbuh dan Payakumbuh-Pangkalan.
4. Pelebaran Jalan Nasional Muaro Kalaban-Sawahlunto
5. Pembangunan Feeder Tol Dharmasraya-Kuansing-Rengat
6. Lanjutan Revitalisasi Jalur Kereta Api Padang-Padang Pariaman-Padang Panjang-Tanah Datar-Solok-Sawahlunto yang merupakan warisan dunia UNESCO.
7. Pembangunan Perlintasan Kereta Api Tabing, Lubuk Buaya dan Pasar Usang
8. Fly Over Duku-BIM, Fly Over Silaing-Bukit Berbunga, Fly Over Air Mancur
9. Underpass/Overpass Lubuk Begalung, Siteba dan Ketaping
10. Fly Over Sitinjau Laut

Untuk Program Pembangunan Infrastruktur Kota Padang yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional direncanakan antara lain:

1. Pengembangan pelabuhan laut Teluk Bayur sebagai pelabuhan laut internasional.
2. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana Terminal Barang, serta prasarana dan sarana Sistem Angkutan Umum Massal
3. Pengembangan infrastruktur jalan Kota
4. Peningkatan pelabuhan perikanan Samudera Bungus.
5. Pengembangan agro industri dan manufaktur di kawasan PIP, industri Semen Padang di Kawasan Indarung
6. Pengembangan sarana perdagangan Pasar Raya Padang
7. Peningkatan TPA Regional di Aie Dingin serta prasarana dan sarana persampahan.
8. Peningkatan dan pengembangan system pengelolaan limbah terpadu
9. Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perkotaan.
10. Peningkatan fasilitas terminal penumpang tipe A atau B
11. Pengembangan sarana kesehatan Rumah Sakit Umum (RSU) dr. M. Djamil
12. Pembangunan sistem drainase primer Rehabilitasi/fungsionalisasi, dan pengembangan jalur kereta api
13. Pembangunan sistem jaringan telekomunikasi di seluruh ibukota kecamatan dan nagari

Sementara itu untuk Kota Bukittinggi rencana Program Pembangunan Infrastruktur diantaranya adalah:

1. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana Terminal Barang, serta prasarana dan sarana Sistem Angkutan Umum Massal
2. Pengembangan infrastruktur jalan Kota
3. Jalan Tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang (80km) – bagian dari Trans Sumatera
4. Peningkatan dan pengembangan system pengelolaan limbah terpadu
5. Pembangunan sistem drainase primer
6. Peningkatan dan pengembangan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL)
7. pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)
8. Peningkatan kapasitas prasarana dan sarana permukiman.
9. Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perkotaan.
10. Peningkatan fasilitas terminal penumpang tipe A atau B
11. Peningkatan pasar regional
12. Rehabilitasi/fungsionalisasi, dan pengembangan jalur kereta api
13. Pembangunan sistem jaringan telekomunikasi di seluruh ibukota kecamatan dan nagari

Dan untuk rencana Program Pembangunan Infrastruktur Kota Payakumbuh adalah:

1. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana Terminal Barang, serta prasarana dan sarana Sistem Angkutan Umum Massal

2. Pengembangan infrastruktur jalan Kota
3. Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi (185km) - bagian dari Trans Sumatera
4. Peningkatan dan pengembangan system pengelolaan limbah terpadu
5. Pembangunan sistem drainase primer
6. Peningkatan dan pengembangan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL)
7. Peningkatan kapasitas prasarana dan sarana permukiman.
8. Peningkatan kapasitas pelayanan airminum di perkotaan.
9. Peningkatan fasilitas terminal penumpang tipe A atau B
10. Peningkatan pasar regional
11. Rehabilitasi/fungsionalisasi, dan pengembangan jalur kereta api
12. Pembangunan sistem jaringan telekomunikasi di seluruh ibukota kecamatan dan nagari

Dalam hal pariwisata, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah menetapkan beberapa rencana pembangunan destinasi wisata diantaranya:

1. Pusat Pelayanan Primer dan Sekunder Pariwisata
 - Kota Padang (Pusat pelayanan Primer)
 - Kota Bukittinggi, Batusangkar dan Sawahlunto (Pusat Pelayanan Sekunder)
2. DPP (Destinasi Pariwisata Provinsi)
 - DPP Padang dan sekitarnya mencakup Kota Padang, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Padang Pariaman dan Kota Pariaman (Marine Tourism)
 - DPP Bukittinggi dan Sekitarnya mencakup Kota Bukittinggi, Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Pasaman, Kab. Pasaman barat dan Kota Payakumbuh dengan tema kawasan pengembangan Taman Bumi (Geopark)
 - DPP Tanah Datar dan sekitarnya, mencakup wilayah Kab. Tanah Datar, kota Padang Panjang, Kab. Solok, Kota Solok dan Kab. Solok Selatan dengan tema Kawasan Pengembangan Minangkabau Tempo Dulu (Ancient Minangkabau Tourism)
 - DPP Sawahlunto dan Sekitarnay yang mencakup wilayah Kota sawhlunto, Kab. Sijunjung dan Kab. Dharmasraya dengan tema utama sebagai kawasan pengembangan wisata warisan budaya tambang batu barat (Coal Mining Heritage Tourism);
 - DPP Kepulauan Mentawai dan sekitarnya yang mencakup wilayah Sipora, Siberut, pagai Utara dan pagai Selatan dengan tema utama sebagai kawasan pengembangan destinasi selancar dan ombak (*Whitesand Tourism*)
3. KSPP (Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi)
 - KSPP Mandeh dan Sekitarnya
 - KSPP Bukittinggi dan sekitarnya
 - KSPP Maninjau dan Sekitarnya
 - KSPP Singkarak dan sekitarnya
 - KSPP Danau Kembar dan Sekitarnya
 - KSPP Siberut dan Sekitarnya

- KSPP Sawahlunto dan Sekitarnya
- 4. KPPP (Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi)
 - Kawasan pariwisata bahari dan budaya Pantai Padang – Kota Tua dan sekitarnya
 - Kawasan pariwisata bahari bungus-mandeh-carocok painan dan sekitarnya
 - Kawasan Pariwisata Bahari Pantai Gondoriah-Tiram dan sekitarnya
 - Kawasan geowisata Ngarai Sianok – Maninjau – Tarusa Kamang dan Sekitarnya
 - Kawasan geowisata dan budaya Siloek – Kampung Padang Ranah – Candi Padang Roco dan sekitarnya
 - Kawasan geowisata Harau – Kelok Sembilan – Ngalau Indah dan sekitarnya
 - Kawasan Geowisata dan budaya pantai sasak- Talamau dan Sekitarnya
 - Kawasan geowisata dan budaya saribu rumah gadang – Goa Batu Kapal – TNKS dan sekitarnya
 - Kawasan ekowisata malibo anai – nyarai dan sekitarnya
 - Kawasan heritage Istano Bas pagaruyuang-Nagari Tuo Pariangan-PDIKM dan sekitarnya
 - Kawasan pariwisata alam dan geowisata Singkarak-Pulau Belibis-Danau Kembar dan sekitarnya
 - Kawasan pariwisata alam dan sains Taman Equator-Rimbo Pantii dan sekitarnya
 - Kawasan Gastrowisata Payakumbuh dan sekitarnya
 - Kawasan warisan budaya Dunia Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto dan sekitarnya

Setelah selesai pemaparan dari Kepala Bidang Infracwil, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi. Dimana dalam diskusi tersebut Pemerintah Kota Padang dan Kota Payakumbuh menyampaikan bahwa mereka telah menyiapkan dokumen tertulis terkait Kegiatan dan Rencana Strategis kedepan terkait Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru.



3. Rapat Evaluasi Kinerja Komisi Irigasi Program IPDMIP Tahun 2024, 3 Juni 2024

Program IPDMIP (*Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program*) atau Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Parsipatif Terpadu merupakan salah satu program pemerintah dibidang pertanian beririgasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dengan mekanisme penerusan hibah (*on granting*) dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah.

Tujuan dari program IPDMIP adalah: (1). meningkatkan produksi pertanian dalam mencapai ketahanan pangan; (2). menguatkan kelembagaan Pengelola Pertanian Irigasi; dan (3). Meningkatkan infrastruktur irigasi yang lebih produktif dan manajemen

Salah satu komponen kegiatan yang dilaksanakan dalam program IPDMIP adalah penguatan kerangka kebijakan dan kelembagaan pertanian beririgasi berupa kegiatan pembentukan dan/atau revitalisasi Komisi Irigasi di Kabupaten dan Provinsi. Komisi Irigasi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah terkait, wakil perkumpulan petani pemakai air, dan wakil pengguna jaringan irigasi tingkat Daerah Irigasi (DI) sesuai kewenangannya berkelanjutan.

Arahan Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Sumber tetap berkomitmen untuk pertanian beririgasi ini terlihat dari dukungan APBD yang diberikan oleh Sumbar untuk pelaksanaan kegiatan pasca IPDMIP

Ditjen Bangda

Rangkaian PCR (*Project Completion Report*), dan Subdit Pertanian Ditjen Bina Bangda telah melakukannya pada 8 Provinsi dan untuk Sumatera sudah dilaksanakan di : Aceh dan Lampung.

Untuk Sumbar dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi terkait dengan kelembagaan yaitu Komir yaitu berupa dukungan dari pemerintah daerah terhadap hal yang baik yang sudah dilakukan IPDMIP

Hasil PCR ini sebagai dasar untuk keberlanjutan program IPDMIP

Kuesioner yang telah diberikan berjumlah 108 pertanyaan, yang terdiri atas : No. 1 s.d 99 teknis pertanian beririgasi dan No. 100 – 108 Kelembagaan Pertanian Beririgasi.

Point 1,2,3 dalam kuesioner wajib untuk di jawab.

SDA BK

Kinerja Komisi Irigasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 :

- Sosialisasi Pola Tanam Tahun 2023 ke Kab. Kota
- Evaluasi RTTG dan dijadikan sebagai bahan penyusunan RTTG 2024
- Juni 2023, Sidang Komisi Irigasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
- Sosialisasi Komisi Irigasi ke Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat

Tindak Lanjut Rekomendasi Komir

1. Prioritas anggaran untuk pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi;

2. Prioritas terhadap pembangunan infrastruktur untuk ketersediaan sumber air dengan pembangunan bendung irigasi;
3. Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan irigasi (P3A/GP3A);
4. Penguatan sekretariat komisi irigasi

Rencana Sidang Komir 2024

1. Provinsi Sumatera Barat telah mengangatkan dana APBD sebesar Rp. 192.710.400 untuk kegiatan Komisi Irigasi dimana akan dilaksanakan sebanyak 1 kali sidang pada tahun 2024;
2. Rapat awal pelaksanaan sidang komisi irigasi akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Juni.
3. Rapat diawali dengan rapat internal sekretariat komisi irigasi, dilanjutkan dengan rapat persiapan dengan mengundang dinas dan instansi serta Lembaga terkait;
4. Peserta sidang komisi irigasi merupakan anggota komisi irigasi yang terdapat pada SK Gubernur Sumatera Barat sebanyak 74 orang;
5. Pelaksanaan Sidang Komisi Irigasi direncanakan akan dilakukan pada minggu ke-4 bulan Juni tahun 2024

Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Hortikultura

Produktivitas sebelum IPDMIP 42,51 Kwintal setelah IPDMIP 58,33 Kwintal (36,80%)

Dalam pelaksanaan IPDMIP beberapa kendala

1. Penyediaan anggaran yang kurang memadai (90,67% total realisasi sampai akhir project)
2. Juknis NPIU Pertanian selalu berubah sehingga terjadi keraguan dalam pelaksanaan kegiatan
3. Penyusunan Juklak NPIU agar menyertakan PPIU Pertanian dan disesuaikan dengan kondisi lapangan

Bappeda Kab. Sijunjung

- Program IPDMIP sangat membantu dalam pertanian beririgasi dengan 18 DI DLI
- Tindak lanjut pasca IPDMIP, tetap berkomitmen dengan penganggaran melalui APBD
- Penelusuran PJI tidak hanya pada DI DLI tetapi juga pada DI Non DLI di Kab. Sijunjung.
- Sampai dengan tahun 2022, Kabupaten Sijunjung telah membuat Dokumen PSETK untuk 179 DI Kewenangan Kabupaten Sijunjung.
- Kabupaten Sijunjung tetap berkomitmen untuk tetap melaksanakan program kerja IPDMIP salah satunya adalah untuk pelaksanaan sidang komisi irigasi dan pada tahun 2023 Komisi Irigasi Kabupaten Sijunjung telah melakukan Sidang Komisi Irigasi sebanyak 2 kali.
- Kabupaten Sijunjung juga telakukan penyuhawa terkait LP2B sunan Dokumen RP2I
- Untuk LP2B, Kabupaten Sijunjung, sesuai dengan informasi dari Bagian Hukum Setda Kab. Sijunjung bahwa terkait LP2B cukup dimasukkan dalam RTRW saja.

Bappeda Kab. Lima Puluh Kota

- Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan Sidang Komisi Irigasi pada Desember 2023 dan tahun 2024 rencana akan dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 6 Juni 2024, narasumber BWS dan Kemen PUPR Ditjen SDA
- Dalam pengisian kuesioner yang disampaikan oleh Tim dari Bina Bangda Kemendagri, Kabupaten Lima Puluh Kota sudah mengisinya yang terkait dengan kewenangan kabupaten, namun untuk nomor 1,2,3 masih belum diisi, terkait P3A masih belum diisi dan LP2B juga belum

Bappeda Kabupaten Pasaman

- Untuk kegiatan Komisi Irigasi Tahun 2023 Kabupaten Pasaman sudah melaksanakan Sidang Komisi Irigasi dan untuk tahun 2024 Kabupaten Pasaman sudah menjadikannya sebagai agenda kerja yang harus dilaksanakan
- Untuk pelaksanaan kegiatan Komisi Irigasi Kabupaten Pasaman diakomodir Bappeda diakomodir dalam sub keg di Kooordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
- Kabupaten Pasaman mempunyai luasan DI 16.100 Ha, dengan luasan yang cukup besar Kabupaten Pasaman dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas sangat terbantu dengan adanya Program IPDMIP dan DAK serta diharapkan Kabupaten Pasaman apabila ada lanjutan program ini untuk dapat menjadi salah satu daerah yang memperoleh program dimaksud.
- Untuk E Paksi, (sudah dikonsultasikan pada tahun 2023)
- Dalam penyusunan RP2I sudah dan terkendala dalam penyatuan Daerah Irigasi karena Kendala : jarak DI (ada 6 DI yang masuk dalam cagar alam) 2023 : sudah dilaksanakan rehab
- DI Batang Andilan ada laporan bencana dan sudah ditangani dengan kegiatan OP
- P3A sudah dilaksanakan berupa pelatihan, 23 P3A dibantu dalam SK Notaris
- Perda LP2B
Belum ditetapkan menjadi Perda dan RTRW 2010 – 2030 sedang proses revisi dan baru pengsulatan penanggaran penyusunan LP2B dan Revisi Perda RTRW dan diakomodir di pergeseran

Pesisir Selatan

- Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 249 DI dan 9 DI kesepakatan IPDMIP
- Kabupaten Pesisir Selatan sudah menyusun Dokumen PSETK sebanyak 249 DI, dan RP2I dan serta realisasi capaian Program IPDMIP 82,14% (42 Milyar)
- Kuesioner yang disampaikan oleh Tim Bina Bangda Kemendagri, Kab. Pesisir Selatan sudah mengisi
- Untuk Kegiatan Komisi Irigasi, Kabupaten Pesisir Selatan akan melaksanakan rapat Sekretariat Komisi Irigasi pada minggu ke - 4 Juni 2024 dan Sidang Komisi Irigasi pada minggu ke – 4 Juli 2024
- Anggaran Irigasi untuk pada tahun 2024 sebesar Rp. 12 Milyar (OP, Rehab Irigasi, Penyusunan Rencana)

- Permasalahan sumber daya air khususnya irigasi adalah bencana mengakibatkan banyak yang terdampak
- Permasalahan dalam IPDMIP : perencanaan dan pelaksanaan konstruksi, perencanaan di BWS dan pelaksanaan di kabupaten, keterlambatan SID mengakibatkan keterlambatan pembangunan,
- Juknis yang terlambat turun mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan
- LP2B sudah diperdakan tahun 2021 dan LP2B fokus pada sawah beririgasi (potensi) dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (fungsi)

Bappeda Pasaman Barat

- Kabupaten Pasaman Barat mempunyai 95 DI dan untuk PSETK Kabupaten Pasaman Barat sudah melakukan penyusunannya.
- Untuk Kegiatan Komisi Irigasi pada tahun 2021 dan 2022, Kabupaten Pasaman tidak melaksanakannya karena adanya Bencana Talamau.
- Kabupaten Pasaman Barat untuk Program IPDMIP mempunyai 7 DI DLI, 3 DI terdampak Bencana Talamau yaitu DI Ingu, DI Nango dan DI Koto Rajo
- Penyusunan SID untuk daerah irigasi dimaksud
- Pasbar sangat tinggi alih fungsi lahannya
- Komisi Irigasi tahun 2024 sedang persiapan pelaksanaan dan akan berkoordinasi dengan Konsultan ISAI
- RP2I sudah disahkan dan belum diinternalisasi dalam dokumen perencanaan
- Dalam penyusunan SID untuk dilibatkan pemerintah daerah karena pemerintah daerah yang akan melaksanakan di lapangan
- AKNOP belum disusun
- Pemeliharaan Irigasi masih belum sesuai prioritas
- LP2B
2016 sudah ditetapkan, dan ada kajian revisi rtrw dan bantek terkait luasan areal dan sudah ditetapkan pada tahun 2023 namun luasan masih dinamis
LP2B fokus pada sawah beririgasi

Tim Ahli Komisi Irigasi (M. Ridha)

Dalam proses pembentukan Komir di Sumbar tidak masalah dan Di Provinsi sangat lancar dan di Kabupaten sampai tahun 2023 masih melaksanakan kegiatan Komir

Komir ini sangat bermanfaat untuk :

1. Sebagai forum untuk petani untuk menyampaikan permasalahan dan terdokumentasikan dengan baik
2. Koordinasi antar OPD (Bappeda, PU dan Pertanian), dan yang dibahas usaha tani dan sebagai bagi OPD untuk menyampaikan programnya
3. Rapat Komir sudah menghasilkan RTTG dan banyak juga kabupaten yang tidak berhasil menetapkan RTTG karena air mereka tidak cukup dan berguna untuk Dinas Pertanian untuk mengatur distribusi pupuk
4. Rekomendasi tentang berbagai persoalan yang dihadapi oleh petani terutama sampah yang tidak bisa diatas oleh petani, perbaikan irigasi, pemeliharaan irigasi, sempadan irigasi, pengambilan air irigasi masalah hutan, pertambangan (dan di

- Kab. Sijunjung sudah peraturan setiap tambang emas harus mengembalikan lahan seperti semula)
5. Rekomendasi tentang peran serta masyarakat
 6. Rekomendasi Komir ada yang sudah bisa dilaksanakan dan ada yang belum seperti pemeliharaan irigasi terkait dengan anggaran dan kebijakan di DPRD
 7. Sosialisasikan peran komir
 8. Rekomendasi yang belum dilaksanakan untuk dapat dituangkan dalam kebijakan pemerintah daerah

Ditjen Bangda

- Prov dan Kab. sudah melaksanakan Komir
- Kuesioner berguna untuk memetakan permasalahan terkait pengelolaan pertanian beririgasi terutama dalam penyusunan SID untuk melibatkan pemerintah daerah namun dalam penyusunan SID membutuhkan anggaran dan ada beberapa daerah tetap untuk dilaksanakan di BWS
- Komitmen Pemerintah Daerah (APBD) terkait dengan OP
- LP2B
Pertimbangan penyusunan belum disampaikan dan LP2B sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan DAK

Beni Irwan

- IPDMIP akan *closing date* Juni 2024, Prov dan Kab. *closing date* Juni 2023
- Hasil misi ADB, dan sudah mempersiapkan DED 394.000, 32 DI kewenangan pusat dana yang akan masuk 729 US (sudah MoU)
- Namun untuk DI Prov dan DI Kab masih belum ditampung
- Diharapkan Pemda untuk berkoordinasi langsung dengan Ditjen SDA PUPR
- IPDMIP II akan dimulai setelah ditetapkan RPJMN 2025 – 2029
- Overview 2023
- Prov. Sumbar Komir 99% dan sudah memperoleh penghargaan, NTB 100%
- Variabel : Pembentukan, Sekretariat, Pendanaan
- Sijunjung (89) dan Pasaman (93)
- Pasaman Barat (54), Lima Puluh Kota (62), Pesisir Selatan (65)
- Diharapkan dukungan dari provinsi ke kabupaten terkait pembinaan komir
- Provinsi : diharapkan untuk merekrut 1 atau 2 tenaga ahli
- RP2I adalah reestranya irigasi, DI kewenangan Pusat, Prov, Kab sudah menjadi dokumen untuk diinternalisasi dalam dokumen perencanaan

Dinas Perkebunan Pertanian Tanaman Pangan Provinsi

LP2B Provinsi sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Dalam implementasinya Sijunjung 10.924 Ha, Pesisir Selatan 24.431 Ha, Kab. Lima Puluh Kota 21.158 Ha, Kab. Pasaman 19.559 Ha, Kab. Pasaman Barat 9.157 HA

Ditjen Bangda

- PCR ini untuk menjaring informasi terkait keberlanjutan IPDMIP
- Lima Puluh Kota tidak termasuk lumbung pangan, tetapi mensupply pangan untuk daerah lain
- LP2B menjadi bahan pertimbangan penting untuk DAK



4. Rapat Koordinasi Emisi Gas Rumah Kaca, 10 Juni 2024

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca, menyediakan data dan informasi aksi mitigasi gas rumah kaca di Provinsi Sumatera Barat melalui aplikasi AKSARA, dan melakukan pemantauan kepada kabupaten/kota yang telah melakukan aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca.

Arahan Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- Menindaklanjuti Surat Bappenas terkait Pelaporan Pembangunan Rendah Karbon Tahun 2023 melalui Aksara
Untuk segera menginput perkembangan pelaporan pembangunan rendah karbon di aksara sebagai dasar untuk penyusunan RPJPD 2025 – 2045
- Dalam RPJMN 2020-2024, penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) merupakan salah satu indikator makro pembangunan, dan secara khusus Pembangunan Rendah Karbon (PRK) menjadi salah satu program prioritas di bawah Prioritas Nasional (PN) 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
- Kementerian PPN/Bappenas memiliki mandat untuk melakukan pengendalian dan evaluasi capaian pembangunan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, maka Kementerian PPN/Bappenas juga wajib melakukan evaluasi, pelaporan, dan pengendalian atas capaian penurunan emisi GRK, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam konteks daerah, penurunan emisi GRK juga turut menjadi salah satu kriteria penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023.

Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura

- Untuk kegiatan yang dilakukan dalam aplikasi Aksara : pertanian organik untuk penggunaan pupuk organik dengan luasan lahan pertanian menerapkan pertanian organik, Sekolah Lapang
- Untuk input 2023, Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura masih dalam tahapan rekapitulasi data
- Untuk luasan pertanian organik adalah 0,016% dari total lahan Sumbar dan untuk pelaksanaan kegiatan pertanian organik ini Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai satgas organik
- Kegiatan tahun 2024 : Sekolah lapang, Luasan 0,0016% dari total lahan Sumbar
- Data dasar sedang direkap
- Ada satgas khusus organik
- Kegiatan tahun 2023 : 5 unit yang berlokasi Di Agam, Sijunjung, Solok Selatan, Tanah Datar
- Terkait dengan aplikasi Aksara diharapkan untuk tetap melakukan pertemuan guna koordinasi

Dinas LH

2023 belum ada input aksara baru 3 kab : Kab Agam, Kota Bukittinggi, Kab. Solok

Dinas Perhubungan

Sedang rekapitulasi

Dinas ESDM

- Terakhir input 2023, PLTN tongar dan lintau, untuk dikoordinasikan kembali dengan Bappenas
- Pembangunan infrastruktur berbasis EBT

Dinas Kelautan dan Perikanan

- 2023 sudah input dan untuk keg 2023 belum cemara laut, mangrove dan terumbu karang dan mangrove dan cemara laut dari provinsi
- Untuk penanaman mangrove di pesisir : satu titik koordinat
- Pilih peningkatan cadangan karbon

Dinas Kehutanan

- Aksara cukup intens, 2023 sudah diinput dan 2024 belum diinput tapi belum semua karena mencakup seluruh bidang dan berbasis koordinat seperti kegiatan patroli hutan harus menggunakan koordinat dan dibuatkan kebijakan menggunakan koordinat.
- Kegiatan – kegiatan yang sudah ada koordinatnya dan ada yang kontribusi data yang meningkatkan cadangan karbon (penanaman karbon)
- Cuma dalam base aksara
- Memasukan aksi : patroli tetapi untuk secara kegiatan tidak merupakan cadangan karbon tetapi di aksara juga dihitung untuk penambahan peningkatan cadangan

Kesimpulan Rapat :

1. Diharapkan kepada OPD untuk dapat segera input Aksara untuk realisasi pencapaian rendah karbon
2. Rapat secara berkala untuk penginputan Aksara



5. Rapat Persiapan Raker Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur PUPR TA 2024, 27 Juni 2024

Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Prov. Sumatera Barat dengan dihadiri oleh perwakilan Kanwil Ditjend Perbendaharaan Prov. Sumbar, SKPD Bidang PU di Prov. Sumbar serta Bappeda Kab/Kota. Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Infraswil Bappeda Prov. Sumbar. Kegiatan ini didasarkan pada surat Kepala Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah nomor : UM0102-Sf/188 tanggal 21 Juni 2024 perihal : Undangan Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur PUPR TA 2024.

Dalam paparannya, beliau menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah di Prov. Sumatera Barat memperoleh beberapa bidang DAK seperti DAK Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Air Minum, Sanitasi, Perkim, Irigasi, Pertanian, dll yang tersebar di 19 Pemerintah Kab/Kota dan Pemerintah Provinsi dengan total pagu Rp. 1.126.548.928,000,-.

Dalam 5 tahun terakhir, alokasi DAK di Sumatera Barat cenderung mengalami penurunan. Dalam kesempatan kali ini, Bappeda Provinsi Sumatera Barat akan lebih focus pada evaluasi pelaksanaan DAK Bidang ke PU an. Dimana DAK Fisik Bidang ke PU an tahun 2024 tersebar pada 13 Pemerintah Kab/Kota dan Pemerintah Prov. Sumatera Barat. Untuk itu diharapkan masing-masing daerah dapat menyampaikan progress pelaksanaan kegiatan DAK Bidang ke PU an tahun 2024.

Kegiatan berikutnya dilanjutkan dengan arahan dari perwakilan Kanwil Dirjend Perbendaharaan Prov. Sumatera Barat. Dalam paparannya beliau menyampaikan

bahwa dari total alokasi DAK di Sumbar Rp. 1.126.548.928,000,-, 90% diantaranya telah diterbitkan RK-nya.

Dan untuk DAK Bidang ke PU an sebesar Rp. 314.551.891.000,- telah diterbitkan RK-nya sebesar 311 milyar rupiah. Dari alokasi anggaran tersebut, beberapa daerah telah melakukan upload kontrak pada aplikasi Omspan dan sudah disalurkan sebesar 44 milyar per tanggal 26 Juni 2024. Selain itu juga terdapat beberapa kontrak yang telah diupload dalam omspan namun anggaran belum disalurkan seperti di Kab. Pasaman (Irigasi).

Selain itu juga terdapat beberapa daerah yang belum upload seperti di Kab. Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Kab. Solok, Kota Padang, Kota Pariaman (Sanitasi, Air Minum, dan PPKT). Diharapkan upload data kontrak dapat dilaksanakan paling lambat tgl 22 Juli 2024.

Selain DAK untuk Pemerintah Daerah, Dirjend Perbendaharaan juga menginformasikan bahwa di Sumbar juga terdapat DAK Perhubungan dan DAK Pedesaan yang menjadi kewenangan Kementerian Terkait.

Sekedar mengingatkan, berdasarkan Undang-Undang HKPD No 1 tahun 2022, porsi anggaran infrastruktur dalam APBD adalah minimal 40%. Untuk itu, hal ini diharapkan menjadi perhatian bagi seluruh Pemerintah Daerah.

Kegiatan dilanjutkan dengan arahan dari perwakilan Inspektorat Prov. Sumatera Barat. Ada beberapa hal yang disampaikan diantaranya:

1. SKPD diharapkan dapat berkoordinasi dengan APIP di daerah masing-masing dalam rangka percepatan Review kegiatan DAK sehingga dapat terlaksana sesuai dengan schedule yang telah direncanakan.
2. Masih terdapat beberapa kegiatan yang belum terkontrak di Pemerintah Prov. Sumatera Barat, khususnya Dinas Pendidikan. Untuk itu diharapkan Dinas Pendidikan dapat berkoordinasi dengan Biro PBJ untuk percepatan proses pengadaan.

Kegiatan dilanjutkan dengan arahan dari Biro Pembangunan Prov. Sumatera Barat. Dalam arahnya disampaikan bahwa berkaca dari tahun 2023, perlu diperhatikan tertib administrasi dari pelaksanaan kegiatan DAK. Karena hal ini menjadi catatan dari Kementerian PUPR. Dimana terdapat beberapa Kab/Kota yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan DAK dalam aplikasi EmonDAK Kementerian PUPR.

Selain itu pada tahun 2023 juga terdapat anggaran DAK yang tidak terserap sebesar 9% serta beberapa kegiatan yang batal pelaksanaannya. Hal ini tentu menjadi perhatian bersama dalam penyusunan perencanaan serta pelaksanaan kegiatan DAK.

Berdasarkan evaluasi dari Dirjend Bangda disampaikan bahwa masih ada daerah yang belum menyampaikan laporan triwulan. Serta juga masih ada daerah yang belum menetapkan SK Tim Pengendalian dan Pemanfaatan DAK Fisik Tahun 2024.

Kegiatan dilanjutkan dengan arahan dari Biro PBJ Prov. Sumbar. Dalam arahnya, beliau menyampaikan bahwa saat ini merupakan waktu-waktu yang krusial dalam tahapan pengadaan Barang dan Jasa untuk DAK tahun 2024. Untuk itu perlu dilakukan percepatan diantaranya dengan mengoptimalkan pengadaan melalui e-purchasing atau *e-cataloge*.

Progres pengadaan untuk Dinas BMCKTR dan SDABK dinilai sudah maksimal dan sesuai rencana. Hanya Dinas Pendidikan yang mengalami perlambatan dalam proses pengadaan. Dimana diperkirakan diawal bulan Juli 2024 kegiatan DAK Pendidikan dapat terkontrak.

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat. Dimana total pagu anggaran DAK Jalan sebesar Rp. 44.154.458.000,- dan seluruhnya telah terkontrak yang terdiri dari

1. DAK Jalan Non Tematik
2. DAK Jalan tematik Penguatan Destinasi Pariwisata
3. DAK Jalan Tematik Peningkatan Konektivitas
4. DAK Jalan Tematik Penguatan Sentra Pangan

Terdapat 4 paket pekerjaan fisik yang didanai melalui anggaran DAK, dimana seluruh paket pekerjaan fisik telah dilakukan pengadaan melalui e-cataloge dan telah terkontrak pada bulan Maret 2024. Adapun paket pekerjaan tersebut, yaitu:

1. Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Singkarak-Aripan-Tj Balit-Padang Ganting (P.093)
2. Penanganan Longsegment Jalan Batu Sangkar - Ombilin (P.070)
3. Penanganan Longsegment Jalan Kantor Camat - Berkat (P.104)
4. Penanganan Longsegment Jalan Padang Koto Gadang - Palembang (P.088)

Adapun permasalahan yang dihadapi dilapangan diantaranya:

1. Terjadinya bencana alam yang cukup massif yang mengakibatkan terjadinya beberapa titik longsor, terban dan tergenang air yang memperparah kondisi jalan
2. Keterlambatan dalam proses pencairan uang muka. Dimana kegiatan terkontrak pada bulan Maret, namun uang muka kerja baru dapat dicarikan pada bulan Mei 2024.
3. Untuk pekerjaan di Kab. Mentawai terdapat kendala berupa ketersediaan material, dimana sebagian material didatangkan dari Cilegon.

Adapun rencana percepatan dalam mengatasi permasalahan diatas adalah:

1. Koordinasi dengan penyedia untuk menambah penggunaan alat, mengoptimalkan subkontrak serta mengoptimalkan pasokan material.
2. Melakukan rapat dengan konsultan dan penyedia untuk melakukan penambahan jam kerja (lembur)

Dinas BMCKTR telah menggunakan e-purchasing dalam pengadaan konstruksi khususnya anggaran DAK. Selain itu beberapa waktu kedepan, akan ada rapat evaluasi dengan pemerintah pusat di Lombok, NTB. Untuk itu diharapkan pemerintah Kab/Kota dapat berkoordinasi dan menyiapkan data terkait progress pelaksanaan kegiatan DAK Fisik.

Untuk aplikasi EmonDAK, Dinas BMCKTR telah melaporkan sampai dengan bulan Mei 2024. Untuk data Juni 2024 masih menunggu pulihnya akses aplikasi EmonDAK. Dan rencananya Dinas BMCKTR juga akan melaksanakan bimtek PKRMS pada tanggal 11 Juli 2024.

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari Dinas SDABK dengan total pagu anggaran Rp. 16.436.043.000,-. Dimana terdapat 5 paket pekerjaan dan telah terkontrak pada

bulan April 2024. Keseluruh paket pekerjaan telah dilakukan review APIP serta telah salur pada bulan Juni 2024.

Adapun progress pekerjaan fisik dan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi DI Bintungan
2. Rehabilitasi DI Sawah Padang
3. Rehabilitasi DI Bandar Gadang
4. Rehabilitasi DI Batang Selo
5. Perkuatan Tebing Batang Palangai

Secara umum pekerjaan fisik berjalan lancar dan telah terkontrak. Hanya pekerjaan rehabilitasi DI Bandar Gadang dan Perkuatan Tebing Batang Palangai yang sedikit terlambat karena faktor cuaca. Namun defiasi pelaksanaan kegiatan fisik ini masih dalam batasan yang normal. Selain itu juga dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam upaya percepatan pelaksanaan kegiatan DAK. Selain itu Dinas SDABK juga menganggarkan kegiatan E-Paksi Wilayah Utara dan E-Paksi Wilayah Selatan melalui anggaran DAK.

Dari paparan yang disampaikan, Dirjend Perbendaharaan menanggapi terkait permasalahan dalam penggunaan aplikasi Omspan. Dimana Dinas BMCKTR terkendala dalam input koordinat dan SP2D dalam usulan pencairan Tahap II karena menu-nya belum tersedia dalam aplikasi Omspan. Hal ini akan dicoba pelajari lebih lanjut oleh Dirjend Perbendaharaan.

Tanggapan dari Biro Pembangunan

Pada Dinas SDABK terdapat anggaran untuk Rapat Koordinasi dengan realisasi fisik telah 100%, namun realisasi keuangan masih 0%.

Dinas SDABK

Untuk kegiatan Rakor telah dilaksanakan di Bappeda dengan pengeluaran berupa belanja honorarium narasumber dan makan minum rapat. Namun saat ini proses pencairan keuangannya masih berjalan.

Kab. Pasaman

Pada tahun 2024, anggaran DAK Kab. Pasaman mengalami kemerosotan yang sangat signifikan. Dimana total anggaran DAK tahun 2024 hanya sebesar Rp. 8.661.935.000,- berupa DAK Jalan tematik mendukung konektivitas daerah. Anggaran DAK ini digunakan untuk pengerjaan Long Segment Ruas Jalan Pintu Padang – Soma. Diharapkan minggu ini paket pekerjaan ini telah terkontrak.

Beberapa upaya percepatan yang telah dilaksanakan dan rencana percepatan :

1. Memprioritaskan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan yang sumber pendanaannya melalui DAK Fisik.
2. Monitoring berkala progres Perencanaan dan Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Memaksimalkan proses pelaksanaan pekerjaan agar selesai sesuai dengan tanggal kontrak pekerjaan.
4. Rapat Bulanan dan Monitoring Lapangan pemantauan progres pelaksanaan.

Kab. Solok Selatan

Pada tahun 2024, Kab. Solok Selatan memperoleh anggaran DAK sebesar Rp. 8.876.626.000,- pada Sub Bidang Jalan yang terdiri dari 2 paket pekerjaan. Dimana kedua paket pekerjaan tersebut telah terkontrak pada bulan Juni 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi) Jl. Bariang – Kuok
2. Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi) Jl. Poros Kantor Bupati - Bangun Rejo

Kab. Sijunjung

Pada tahun 2024, Kab. Sijunjung mendapat anggaran DAK sebesar Rp. 10.102.064.000,- pada sub bidang jalan dengan pekerjaan berupa pemasangan leger pada ruas jalan Muaro-Silokek. Dimana pekerjaan ini telah terkontrak pada bulan Mei 2024 dan telah dilakukan pencairan uang muka sebesar 20%. Sementara untuk progress fisik baru mencapai 1,15%.

Adapun kendala yang dihadapi adalah bencana alam yang terjadi pada beberapa akses jalan menuju lokasi.

Kab. Tanah Datar

Pada tahun 2024 Kab. Tanah Datar mendapat anggaran DAK Rp. 42.652.000.000 yang terdiri dari 2 bidang DAK yaitu DAK Jalan dan DAK Irigasi. Untuk DAK Jalan terdiri dari 2 tematik dengan 5 paket pekerjaan. Dimana seluruh paket pekerjaan tersebut telah terkontrak.

Sementara untuk DAK Irigasi terdiri dari 6 paket pekerjaan, dan seluruhnya telah terkontrak dengan progress fisik berkisar antara 3-9%. Keterlambatan pekerjaan fisik ini tidak lepas dari bencana alam yang terjadi di Kab. Tanah Datar.

Kab. Solok

Pada tahun 2024, Kab. Solok mendapat DAK sebesar Rp.30.487.285.000 yang terdiri dari DAK Bidang Jalan dan Irigasi.

Untuk DAK Jalan terdiri dari 3 tematik, dimana seluruh paket pekerjaan belum terkontrak. Ditargetkan seluruh paket pekerjaan ini dapat terkontrak pada bulan Juli 2024.

Untuk DAK Irigasi terdapat 6 paket pekerjaan dan seluruhnya telah terkontrak. Ditargetkan seluruh paket pekerjaan ini dapat terkontrak pada bulan Juli 2024.

Keterlambatan ini disebabkan karena adanya kelalaian dari pihak SKPD teknis serta terlambatnya penerbitan SK standar harga satuan. Khusus untuk penetapan standar harga satuan ini, telah menjadi permasalahan berulang di Kab. Solok.

Kota Padang

Untuk tahun 2024, Kota Padang mendapat alokasi anggaran DAK sebesar Rp. 5.953.544.000 berupa DAK Jalan. Pekerjaan berupa penanganan Jalan Ruas Pantai Air Manis dan telah terkontrak pada tanggal 20 Mei 2024.

Kanwil Perbendaharaan

Pemerintah Daerah diharapkan dapat memaksimalkan RK yang telah diterbitkan. Karena pada periode-periode sebelumnya masih terdapat sisa RK yang tidak termanfaatkan oleh daerah.

Inspektorat Provinsi Sumbar

Dalam hal terkendalanya proses pengadaan di beberapa UKPBJ daerah, diharapkan Biro PBJ Sumbar dapat berkoordinasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pengadaan di Kab/Kota.

Biro Pembangunan

Pemerintah Daerah telah membentuk tim Monitoring, Pengendalian dan Pemanfaatan DAK. Dimana tim ini diharapkan dapat melakukan mitigasi terhadap keterlambatan pelaksanaan kegiatan DAK. Selain itu juga perlu menjadi perhatian untuk pekerjaan-pekerjaan yang berakhir pada bulan Desember. Jangan sampai pekerjaan tersebut terkendala mengingat keterbatasan waktu untuk menghindari terjadinya putus kontrak maupun pekerjaan melewati tahun anggaran.

Biro PBJ

Terkait pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari DAK, banyak SKPD yang bermain pada limit waktu Omspan. Diharapkan hal ini tidak terjadi lagi agar progress pelaksanaan pekerjaan dapat cepat terrealisasi. Sementara itu, untuk pengadaan jasa pengawas/supervisi saat ini masih belum bisa dilakukan melalui e-catalog. Hal ini disebabkan karena Perpres Pengadaan Barang dan Jasa belum mengatur tentang e-catalog untuk jasa konsultan pengawasan. Untuk mensiasati hal ini, SKPD dapat melakukan tender dini atau melalui penunjukan langsung dengan memperhatikan Perka LKPP No 3 tahun 2022.

Kab. Pesisir Selatan

Pada tahun 2024, Kab. Pesisir Selatan mendapat anggaran Rp. 21.713.890.000,- berupa DAK Jalan yang terdiri dari 2 tematik yaitu: Mendukung Konektivitas Daerah dan tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas yang terdiri dari 2 paket pekerjaan dan sudah terkontrak pada bulan April 2024 serta telah dilakukan pencairan uang muka pekerjaan.

Untuk Laporan EmonDAK tahun 2024 telah disampaikan.

Kab. Padang Pariaman

Pada Tahun 2024, Kab. Padang Pariaman mendapat anggaran DAK sebesar Rp. 33.551.325.000,- yang terdiri dari DAK Jalan dan DAK Irigasi.

DAK Jalan terdiri dari 5 paket pekerjaan, dimana seluruh paket pekerjaan telah terkontrak. Sementara untuk DAK Irigasi terdiri dari 3 paket pekerjaan dan saat ini tengah dalam proses pengadaan di UKPBJ.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan DAKdiantaranya:

1. Gagalnya pihak penyedia dalam menepati waktu penyelesaian pekerjaan sesuai dengan perjanjian dengan berbagai macam alasan

2. Hujan yang terjadi hampir sepanjang tahun yang mengakibatkan terjadi banjir dan longsor, sehingga perlu dilakukan review design
 3. Adanya Konflik kepentingan masyarakat setempat
- Upaya percepatan yang akan dilakukan adalah:
1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Secara berkala pada masa pelaksanaan kegiatan
 2. Mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi
 3. Memaksimalkan fungsi tim teknis dan pengawas dalam penyelesaian pekerjaan
 4. Terhadap terjadinya keterlambatan pekerjaan konstruksinya dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja (jumlah tenaga kerja dan jam kerja)
 5. Melakukan review design atau revisi design apabila ada perubahan kondisi lapangan yang tidak sesuai dengan kondisi perencanaan semula
 6. Melakukan Mediasi antara Penyedia, Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari dengan masyarakat saat terjadi konflik dengan masyarakat setempat

Kab. Agam

Tahun 2024 Kab. Agam mendapat anggaran DAK Rp. 23.353.192.000,- berupa DAK Jalan dan DAK Irigasi.

Untuk DAK Jalan terdiri dari 2 tematik dengan total 4 paket pekerjaan dimana seluruhnya telah terkontrak pada bulan Maret 2024.

Untuk DAK Irigasi terdiri dari 5 paket pekerjaan dan saat ini seluruhnya telah terkontrak pada bulan Mei 2024.

Kendala yang dihadapi saat ini adalah terkait pencairan tahap II yang masih terkendala.

Untuk Laporan pada EmonDAK telah disampaikan.

Kab. Pasaman Barat

Pada tahun 2024, Kab. Pasaman Barat mendapat anggaran DAK sebesar Rp. 17.069.319.000,- yang terdiri dari DAK Bidang Jalan dan DAK Bidang Irigasi.

Untuk DAK Jalan terdapat 3 paket pekerjaan fisik, dimana seluruhnya telah terkontrak pada bulan Juni 2024

Untuk DAK Irigasi, Kab. Pasaman Barat mendapat DAK tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, perikanan dan Hewani) yang terdiri dari 2 paket pekerjaan fisik. Saat ini kedua paket pekerjaan tersebut masih berproses di ULP.

Kota Pariaman

Tahun 2024, Kota Pariaman mendapatkan anggaran DAK tematik PPKT dengan pagu anggaran Rp.9.297.710.000,- yang terdiri dari DAK Air Minum, Sanitasi dan Permukiman.

Sampai saat ini seluruh paket pekerjaan masih belum terkontrak.

Untuk DAK Sanitasi dan Air Minum terdapat kendala karena perubahan SOTK. Dimana kegiatan awalnya akan dilaksanakan oleh Dinas Perkim, dipindahkan ke Dinas PUPR. Sehingga ketersediaan SDM menjadi permasalahan saat ini.

Selain itu juga terdapat kendala pada ketersediaan lahan. Dimana dibutuhkan sertifikat tanah untuk lokasi kegiatan. Dan proses sertifikasi tersebut baru selesai pada bulan Mei 2024. Setelah selesai sertifikat tersebut Pemerintah Kota Pariaman melanjutkan dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat



6. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan APBN TA 2024 dan Rencana Kerja TA 2025, 23 Oktober 2024

Arahan Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Highlight Indikasi Intervensi Sumatera Barat dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru :

- Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terpusat di Kabupaten Solok Selatan
- Pembangunan sistem pengelolaan persampahan skala kawasan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Tua Pejat
- Pembangunan Sistem Pengembangan Air Minum Ibu Kota Kecamatan Sontang di Kabupaten Pasaman
- Pembangunan Intake dan Jaringan Transmisi Air Baku Sirilanggai

Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi :

- Pembangunan Daerah Irigasi Batang Sinamar
- Pembangunan infrastruktur pengendali banjir pada Batang Agam, Batang Lembang, Batang Suliti, dan Kabupaten Dharmasraya
- Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi
- Penanganan Jalan Daerah Ruas Lubuk Lasiah – Surian
- Penataan Kelok Sembilan

Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan :

- Penanganan jalan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar di Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai

Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur :

Pembangunan prasarana pengaman pantai (seawall dan bangunan pengaman pantai) pada Pantai Sikabalu dan Pantai Pokai

Sesi I

BPJN :

- Kemantapan Jalan Semester I 2024 91,12%, (1.297,07 km), tidak mantap 8,8%.
- Total alokasi anggaran BPJN 2024 : Rp. 921,15 Milyar, yang terdiri atas :
- Konektivitas sebesar Rp. 890,64 Milyar
- Dukungan Manajemen Rp. 30,52 Milyar

Kegiatan tahun 2024 :

1. Pembangunan Jalan Rp. 244,92 Milyar (26,58%) sepanjang 28,17 km 4 paket
2. Penggantian jembatan Rp. 57,51 Milyar (6,24%) sepanjang 230,6 meter 4 paket
3. Preservasi Jalan Nasional Rp. 505,13 Milyar (54,81%) sepanjang 1.23 km 48 paket
4. Inpres Jalan Daerah Rp. 23,92 Milyar (2,60%) sepanjang 5,80 KM 2 paket
5. Kegiatan Jalan Bebas Hambatan Rp. 0,10 Milyar (0,01%)
6. Dukungan Teknis Rp. 59,53 Milyar (6,46%)

Progres Fisik dan Keuangan TA. 2024, keuangan 74,12% dan fisik 75,87%

Optimasi IJD TA. 2024

NO	PROVINSI/SATKER/NAMA PAKET	KAB. /KOTA	PANJANG	ALOKASI	TEMATIK
			(Km)	(Rp Ribu)	
	SUMATERA BARAT		85.63	542,932,688	
	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SUMATERA BARAT		39.93	224,788,587	
1	Pembangunan Jembatan Lubuk Pauh	Kab. Tanah Datar	0.07	27,954,877	Kawasan Pertanian
2	Preservasi Jalan Bts. Kota Payakumbuh – Sitangkai (Paket I)	Provinsi Sumatera Barat	5.85	49,299,899	Konektivitas
3	Preservasi Jalan Bts. Kota Payakumbuh - Sitangkai (Paket II)	Provinsi Sumatera Barat	9.65	49,406,898	Konektivitas
4	Preservasi Jalan Piobang Koto - Panjang R-007 dan Jalan Tanjung Pati - Simalanggang R-048	Kab. Lima Puluh Kota	7.58	24,967,279	Kawasan Produktif
5	Preservasi Jalan Simp. III Rumbai - Muara Tais	Kab. Pasaman	7.42	34,898,481	Kawasan Perkebunan
6	Preservasi Jalan Simpang Tiga Alin - Paraman Ampalu	Kab. Pasaman Barat	4.08	15,282,829	Kawasan Produktif
7	Preservasi Jalan Bawan Tuo - Padang Bio Bio (R.15.010)	Kab. Agam	2.15	11,020,317	Kawasan Pertanian
8	Preservasi Jalan Kamp. Ladang - Sei Gimbar	Kab. Padang Pariaman	3.13	11,958,007	Kawasan Pariwisata
	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROV. SUMATERA BARAT		45.70	318,144,101	
9	Preservasi Jalan Jl. M. Hatta	Kota Padang	5.71	28,548,556	Konektivitas
10	Preservasi Jalan Lubuk Pinang - Perumnas Talimato	Kota Sawahlunto	3.80	23,956,373	Konektivitas
11	Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok	Kota Solok	2.57	62,540,932	Konektivitas
12	Preservasi Jalan Sungai Rumbai - Batas Solok Selatan	Kab. Dharmasraya	6.50	47,300,000	Konektivitas
13	Preservasi Jalan Tj. Bonai Aur - Tamparungo	Kab. Sijunjung	5.19	16,878,430	Kawasan Pariwisata
14	Preservasi Jalan Simp. Silaut III - Silaut III	Kab. Pesisir Selatan	6.57	39,307,857	Konektivitas
15	Preservasi Jalan Rimbo Data - Kapujan	Kab. Solok	7.26	43,439,382	Konektivitas
16	Preservasi Jalan Ekowisata Bukit Cambai	Kab. Solok	1.10	7,389,271	Kawasan Pariwisata
17	Preservasi Jalan Jl. S. Sungkai - Log Batu Sandi/Batas Dharmasraya	Kab. Solok Selatan	7.00	48,783,300	Kawasan Perkebunan

PENANGANAN RUAS JALAN MELALUI INPRES JALAN DAERAH TA. 2024

NO	PROVINSI/SATKER/NAMA PAKET	KAB. /KOTA	PANJAN (Km)	ALOKASI (Rp Ribu)	TEMATIK
	SUMATERA BARAT		5,80	23.920.022	
	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT		5,80	23.920.022	
1	PRESERVASI JALAN PIOBANG - KOTO PANJANG R-007 DAN JALAN TANJUNG PATI - SIMALANGGANG R-048	Kab. Lima Puluh Kota	3,65	12.899.705	Kawasan Produktif
2	PRESERVASI JALAN BAWAN TUO - PADANG BIO BIO (R.15.010)	Kab. Agam	2,15	11.020.317	Kawasan Pertanian

Bencana Alam Provinsi Sumatera Barat terdapat 240 titik yang dibagi atas :

- Kritis 79 titik
- Ditangani Darurat 161 titik

Skema rencana penanganan pasca bencana alam :

79 titik kritis :

- PMTD (penggunaan Dana Kegiatan Mendesak dan Tanggap Darurat) 6 titik → Surat Persetujuan Menteri KU.0212-Mn/490 dan sedang audit BPKP
 - Usulan PMTD (Pesisir Selatan) 3 titik → masih menunggu surat izin menteri
 - Usulan PMTD (Baso Batas Riau) 2 titik → sedang diproses oleh tim TKC Pusat
 - PL Lembah Anai 13 titik → proses pengajuan BUN
 - Usulan Bencana Alam 26 titik → Desain tersedia 3 titik
 - SHT (Sisa Hasil Tender) → 5 titik + 2
 - Belum ada nilai dan desain 21 titik
- } Menunggu Proses Revisi DIPA

Rencana Program TA. 2025 Provinsi Sumatera Barat

Total Alokasi 2025 : Rp. 656,62 Milyar, terdiri atas :

Konektivitas Rp. 631,58 Milyar

Dukungan Manajemen Rp. 25,34 Milyar

Target Kemantapan Jalan TA. 2025 : 92,35%, Target Kemantapan Jembatan TA. 2025 93,87 %

REKAP PER KEGIATAN (Rp Miliar)						
KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN	DUKUNGAN TEKNIS	DUKUNGAN MANAJEMEN	TOTAL
PEMBANGUNAN JALAN	PEMBANGUNAN JEMBATAN	PRESERVASI	JALAN BEBAS HAMBATAN			
24,25 M	61,20 M	458,67 M	0,00 M	57,47 M	25,34 M	656,62 M
3,69%	13,88%	69,82%	0,00%	8,75%	3,86%	100,00%
3,6 KM/1 PKT.	0,675 KM/11 PKT.	1423,40 KM/ 30 PKT.	-	-	-	-

BWSS V

Wilayah Kerja BWS Sumatera V Padang meliputi 12 Kabupaten dan 7 Kota yang tersebar di

Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Rupiah Murni Rp. 323.922.708.000, SBSN Rp. 14.000.372.000, PHLN Rp. 60.510.500.000

Pelaksanaan Kegiatan BWS SUMATERA V PADANG

- Satuan Kerja Balai
- Satuan Kerja OP SDA
- SNVT PJPA WS Batanghari
- SNVT PJPA WS IAKR
- SNVT PJSA ZWS Batanghari
- SNVT PJSA WS IAKR Satuan Kerja Balai

Peta sebaran pekerjaan Tahun Anggaran 2024

1. Pembangunan DI Batang Sinamar Kab. Tanah Datar
2. Rehabilitasi Sumur Bor di WS Indragri Akuaman Prov. Sumbar
3. Pembangunan Bangunan Pengendali Sendimen Inlet Danau Maninjau di Kec. Tanjung Raya (Tahap I)
4. Rehabilitasi Prasarana Air Baku Batang Agam Kota Payakumbuh
5. DED Pengendalian Banjir Batang Mangor Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman
6. Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities Phase II - Padang Sub Project
7. Rehabilitasi Prasarana Air Baku Kota Padang
8. Pengeboran Sumur Air Tanah Universitas Andalas Kota Padang
9. Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Kawasan Sawah Laweh Tarusan di Kab. Pesisir Selatan- Lanjutan
10. Rehabilitasi D.I. Kawasan Lubuk Buaya di kab. Pesisir Selatan –Lanjutan
11. Pengendalian Banjir Batang Palangai Kab. Pesisir Selatan

Realisasi sampai dengan 22 Oktober 2024 Rp. 281.766.730.000 (70,72%) Fisik 71,68%
Kendala Pelaksanaan Kegiatan TA. 2024 :

Pembebasan lahan yang masih berjalan pada beberapa paket pekerjaan yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan konstruksi seperti:

1. Pembangunan DI. Batang Sinamar di Kab. Tanah Datar – Lanjutan
2. Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Kawasan Sawah Laweh Tarusan di Kab. Pesisir Selatan-Lanjutan
3. Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Kawasan Sawah Laweh Tarusan di Kab. Pesisir Selatan-Lanjutan
4. Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities Phase II - Padang Sub Project (Batang Kandis; Kota Padang)

Rencana Kegiatan TA. 2025

Rincian Kegiatan TA 2025 (Kegiatan Tahun Anggaran 2025 ada 17 paket kontraktual dan 3 kegiatan studi perencanaan)

A. Paket Kontraktual

No	Nama Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp Ribu)
1	Pembangunan D.I Sawah Laweh Kabupaten Pesisir Selatan	12,500,000
2	Rehabilitasi D.I Panti Rao Kabupaten Pasaman	10,000,000
3	Peningkatan D.I Batanghari Kabupaten Dharmasraya	12,500,000
4	Rehabilitasi D.I Batang Anai	13,500,000
5	D.I Sinamar Kab. Tanah Datar yang Dibangun (lanjutan)	35,000,000
6	Pembangunan Bangunan Pengendali Lahar/Sedimen Kawasan Gunung Marapi di Provinsi Sumatera Barat	75,295,569
7	Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir Batang Mangor di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman	20,800,000
8	Pembangunan Pengaman Pantai Kabupaten Kepulauan Mentawai	11,533,000
9	UFCS Phase-II Padang	44,181,543
10	Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Suliti Kabupaten Solok Selatan	43,000,000

BPPW

Pagu BPPW Tahun Anggaran 2024 Rp. 396.862.256.000

Realisasi s.d 20 Oktober 2024 : Rp. 233.572.897.000 (58,85%) Fisik 60,97%

Rekapitulasi Progres Single-Years Contract

NO	SATKER / NAMA PAKET	TANGGAL KONTRAK	PAGU TA 2024 (Rp Ribu)	NILAI KONTRAK (Rp Ribu)	REALISASI KEUANGAN (Rp Ribu)	PROGRES TA 2024 (%)	
						KEU	FIS
1	Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Air Sonsang, Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan	25-01-2024 19-12-2024	11.833.688	11.833.688	9.940.298	84,00	91,12
2	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan Mendukung Inpres Air Minum SPAM Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat	10-09-2024 01-01-2025	1.030.226	936.569	280.971	27,27	21,38
3	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan dan SR Mendukung Inpres Air Minum SPAM Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat	10-09-2024 01-01-2025	8.936.900	7.529.000	3.839.790	42,97	35,25
4	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan Mendukung Inpres Air Minum SPAM Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat (E-Catalogue)	10-09-2024 01-01-2025	1.212.384	1.212.384	258.687	21,34	0,00
5	Penyusunan DED Penanganan SPAM Pasca Bencana Provinsi Sumatera Barat	2024	399.960	399.960	0	0	0
6	Optimalisasi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Tengah Kota Pariaman	18-03-2024 16-06-2024	403.793	403.793	403.793	100	100
7	Penyelesaian Pembangunan Masjid Agung Dharmasraya	29-05-2024 25-12-2024	16.900.000	15.400.783	3.080.157	18,23	45,44

**LAPORAN AKHIR KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2024**

8	Penataan Kawasan Pusaka di Kota Sawahlunto	02-07-2024 29-12-2024	4.400.000	4.000.000	2.320.000	52,73	51,03
9	KDP Gedung Teknik Industri dan Teknik Lingkungan Universitas Andalas	05-07-2024 01-01-2025	21.724.209	20.813.151	8.658.271	39,86	29,07

Rekapitulasi Progres *Multi-Years Contract*

NO	SATKER / NAMA PAKET	PERIODE MYC	RINCIAN PAGU TAHUNAN (Rp Ribu)	NILAI KONTRAK (Rp Ribu)	REALIASI KEU THD NILAI KONTRAK (Rp Ribu)	PROGRES TA 2024 (%)		PROGRES KUMULATIF (%)	
						KEU	FIS	KEU	FIS
1	Pembangunan Terintegrasi Rancang-Bangun-Operasi TPST Kota Padang	2024-2025	TA. 2024 : 55.868.182 TA. 2025 : 47.909.203	-	-	-	-	-	-
3	Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Madrasah Provinsi Sumatera Barat 1	2023-2024	2023; 14.850.000 2024; 10.772.345	25.622.345	25.622.345	100	100	100	100
4	Pembangunan Pasar Raya Kota Padang	2023-2024	2023; 30.399.100 2024; 77.089.854	107.488.954	101.039.642	91,63	99,47	94,00	99,68
5	Pembangunan Pasar Painan	2023-2024	2023; 12.558.012 2024; 40.774.988	53.333.000	33.802.587	62,97	78,80	70,00	82,33
6	Pembangunan Pasar Dharmasraya Sumatera Barat	2023-2024	2023; 10.747.020 2024; 73.970.980	84.718.000	47.732.510	52,48	54,53	56,34	54,53

Pelaksanaan Kegiatan Bidang Cipta Karya TA. 2024

SEKTOR PRASARANA STRATEGIS

1. KDP Gedung Teknik Industri dan Teknik Lingkungan Unand Rp. 21.724.209.000,- Realisasi Fisik 29,06% dan Keuangan 39,86%
2. Rehabilitasi Dan Renovasi Prasarana Madrasah Provinsi Sumatera Barat 1, pembiayaan Rp. Rp 25.622.345.000,- terdiri atas : Pagu TA 2023 : Rp 14.850.000.000, Pagu TA 2024 : Rp 10.772.345.000.
Kemajuan pelaksanaan kegiatan per 16 Agustus 2024 : Keuangan 100%, Fisik 100%
3. Pembangunan Pasar Raya Kota Padang, Pembiayaan : Rp 107.488.954.000,- Pagu TA 2023 : Rp 30.399.100.000, Pagu TA 2024 : Rp 77.089.854.000
Kemajuan Pelaksanaan: 18 Oktober 2024 : Keuangan 91,63%, Fisik 99,47%
4. Pembangunan Pasar Painan, Pembiayaan : Rp 53.333.000.000,- terdiri atas : Pagu TA 2023 : Rp 12.558.012.000, Pagu TA 2024 : Rp 40.774.988.000
Kemajuan Pelaksanaan: 17 Oktober 2024 : Fisik 78,80%, 62,97%
5. Pembangunan Pasar Dharmasraya, Pembiayaan : Rp 84.718.000.000,- terdiri atas : Pagu TA 2023 : Rp 10.747.020.000,-, Pagu TA 2024 : Rp 73.970.980.000
Kemajuan Pelaksanaan: 18 Oktober 2024 : Keuangan 52,48%, 54,526%

PENANGANAN PASCA BENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT

Estimasi Kebutuhan Biaya Provinsi Sumatera Barat

No.	Uraian	Estimasi Anggaran (Rp.)
A	Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan	20,360,295,000
1	SPAM Kabupaten Pesisir Selatan	9,676,185,000
2	PAMSIMAS Kabupaten Pesisir Selatan	10,684,110,000
B	Bencana di Kab. Agam, Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang dan Kota Bukittinggi	112,540,378,260
1	Sektor Air Minum	58.037.737.000
2	Sektor Prasarana Strategis	15,744,067,260
TOTAL		73,781,804,260

Penanganan SPAM Pasca Bencana Di Kabupaten Pesisir Selatan

Kendala Lapangan

1. Lumpo, akses jalan aspal yang ada menuju lokasi pekerjaan tergolong sempit/kecil.
2. Salido Ketek, akses jalan aspal yang ada menuju lokasi pekerjaan tergolong sempit/kecil, dapat dilanjutkan menggunakan kendaraan bermotor atau roda 2 dan dilanjutkan kembali berjalan kaki sejauh 300 meter menuju titik pekerjaan.
3. Taratak Tompatiah, akses jalan aspal yang ada menuju lokasi pekerjaan tergolong sempit/kecil, dilanjutkan kembali berjalan kaki sejauh 100 meter menuju titik pekerjaan, tidak ada jembatan penyebrangan untuk menyebrangi sungai.
4. Surau Pasie, akses jalan aspal yang ada menuju lokasi pekerjaan tergolong sempit/kecil, dilanjutkan kembali berjalan kaki sejauh 100 meter menuju titik pekerjaan, tidak ada jembatan penyebrangan untuk menyebrangi sungai, akses untuk menyebrangi sungai menggunakan perahu rakitan masyarakat setempat.
5. Lubuk Nyiur, akses jalan aspal yang ada menuju lokasi pekerjaan tergolong lebar.
6. Sungai Nyalo, akses jalan aspal yang ada menuju lokasi pekerjaan tergolong lebar.
7. Surantih, akses jalan aspal yang ada menuju lokasi pekerjaan tergolong lebar.
8. Asam Kumbang, tidak ada akses kendaraan menuju titik pekerjaan, ditempuh dengan berjalan kaki sejauh 7 km (3 jam tracking), area yang dilalui merupakan daerah rawan longsor, masih terdapat hewan nokturnal (hewan buas), aturan adat masyarakat setempat mengharuskan segala kegiatan yang berada pada area tersebut (hutan/bukit) dihentikan sebelum jam 15.00 (sudah berada di area aman/pemukiman).
9. Balai Gadang, akses jalan aspal yang ada menuju lokasi pekerjaan tergolong sempit/kecil, dapat dilanjutkan menggunakan kendaraan bermotor atau roda 2 sejauh 3 km (30 menit) dan dilanjutkan kembali berjalan kaki sejauh 200 meter menuju titik pekerjaan.
10. Kambang, tidak ada akses kendaraan menuju titik pekerjaan, ditempuh dengan berjalan kaki sejauh 2 km (1 jam tracking).
11. Airpura, kendaraan roda 4 hanya dapat masuk hingga WTP Airpura, dikarenakan tidak ada akses kendaraan menuju titik pekerjaan, ditempuh dengan berjalan kaki

sejauh 2 km (1 jam tracking), jalur yang dilalui merupakan daerah rawan longsor,-
masih terdapat hewan nokturnal (hewan buas).

Penanganan SPAM Pasca Bencana Di Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan
Kota Padang Panjang

Waktu Pelaksanaan

Mulai : 22 Agustus 2024 Selesai : 18 April 2025 (240 Hari Kalender)

Lingkup Kegiatan:

- A. SPAM Kabupaten Agam
- B. PAMSIMAS Kabupaten Agam
- C. SPAM Kabupaten Tanah Datar
- D. PAMSIMAS Kabupaten Tanah Datar
- E. SPAM Kota Padang Panjang

Progres minggu ke-9 : Fisik 14,98%

Kendala :

- Beberapa gambar masih dalam proses pengerjaan
- Terdapat beberapa penambahan item pekerjaan

Rencana Tindak Lanjut :

1. Penambahan staf drafter dan QS untuk mempercepat pekerjaan administrasi dengan target bulan November BOQ awal sudah Selesai
2. Melakukan Pengukuran, pengecekan dan pembuatan berita acara Bersama MK dan tim PUPR terkait dengan pekerjaan perbaikan dilapangan

RENCANA KEGIATAN BIDANG CIPTA KARYA TA. 2025

No	Nama Kegiatan	Sektor	Lokasi	Pagu Indikatif(Rp Ribu)
1	Revitalisasi Sekolah Provinsi Sumatera Barat	Prasarana Strategis	Prov. Sumatera Barat	417,577,705
2	Revitalisasi Madrasah Provinsi Sumatera Barat	Prasarana Strategis	Prov. Sumatera Barat	73,455,664
3	Pembangunan Terintegrasi Rancang Bangun TPST KotaPadang	Sanitasi	Kota Padang	44,200,000
4	Pembangunan Sanimas	Sanitasi	Prov. Sumatera Barat	8,000,000
5	Pembangunan Sanitasi LPK	Sanitasi	Prov. Sumatera Barat	2,500,000
6	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan dan SRMendukung Inpres Air Minum SPAM Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat	Air Minum	Kabupaten Sijunjung	2,668,000
Total				564,001,369

Untuk usulan yang akan diinputkan ke dalam SIPPA harus mempunyai RC dengan skor 75%

Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang

Total Anggaran 2024 Rp. 355.992.948.000,-
Rencana Pagu 2025 Rp. 108.856.900.000,-
Rincian Anggaran Per Kegiatan

KEGIATAN		JUMLAH	SUMBER DANA
Program Infrastruktur Konektivitas			
1	Sertifikasi Dan Pengamanan Aset Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Rp. 850.000.000,-	PNBP
2	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Lubuk Alung - Kayu Tanam	Rp. 15.000.000.000,-	RM
3	Sertifikasi (Uji Riksa) di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Rp. 251.724.000,-	PNBP
4	Perawatan Stasiun di Wilayah BTP Sumbar	Rp. 358.460.000,-	RM
5	Jasa Konsultansi Pengawasan IMO di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Rp. 2.156.879.000,-	RM
6	Pemeliharaan JPL antara Padang-Naras	Rp. 3.500.000.000,-	RM
7	Pemeliharaan EWS antara Padang - Naras	Rp. 1.500.000.000,-	RM
8	Penanganan Perlintasan Sebidang di Sumatera Barat	Rp. 35.000.000.000,-	RM
9	Pemeliharaan Jalur KA dan Fasilitas Pendukung Keselamatan (Rambu, patok rel, pagar ornamen, dan jalan inspeksi)	Rp. 5.000.000.000	RM
10	Pengoperasian JPL di Wilayah Sumatera Barat	Rp. 5.500.000.000	RM
11	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	Rp. 16.372.377.520,-	RM
12	Laporan monitoring pelaksanaan izin lingkungan wilayah Sumatera Barat	Rp. 1.890.000.000,-	RM
JUMLAH		Rp. 87.879.440.000,-	

Kegiatan yang Perlu di Bahas Lebih Lanjut

KEGIATAN		PAGU SAAT INI	RENCANA PENGALIHAN KEGIATAN
1	Penanganan Perlintasan Sebidang di Sumatera Barat	Rp. 35.000.000.000,-	Penyusunan Studi Kelayakan
2	Laporan monitoring pelaksanaan izin lingkungan wilayah Sumatera Barat	Rp. 1.890.000.000,-	Penyusunan Studi Kelayakan Jalur KA Padang-Padang Panjang-Payakumbuh
3	Pemeliharaan Jalur KA dan Fasilitas Pendukung Keselamatan (Rambu, patok rel, pagar ornamen, dan jalan inspeksi)	Rp. 5.000.000.000	1. Penyusunan Studi Kelayakan Padang- Naras-Sungai Limau-Pasaman Barat 2. Penyusunan Studi Kelayakan Padang- Padang Panjang-Muarokalaban-Muaro
JUMLAH		Rp.41.890.000.000-	

Isu Perkeretaapian Sumatera Barat 2025 – 2029

1. Keselamatan di perlintasan sebidang
2. Integrasi antar moda
3. Pencurian aset dan banguna liar di jalur kereta api
4. Reaktivasi

Rencana Kegiatan Tahun 2025

1. Studi Kelayakan Reaktivasi Jalur Ka Naras – Sungai Limau
2. Studi Kelayakan Reaktivasi Jalur Ka Padang – Padang Panjang -Solok - Sawahlunto
3. Studi Penanganan Perlintasan Sebidang;
4. Penanganan Perlintasan Sebidang
5. Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)
6. Pengamanan Aset Perkeretaapian

Kegiatan Tahun 2025

Studi Kelayakan Reaktivasi Jalur KA antara NARAS – SUNGAI LIMAU

1. Pengembangan Aksesibilitas Moda Transportasi Kereta Api;
2. Dukungan ke Akses Wisata sekitar Sungai Limau;
3. Penyediaan Angkutan Barang ke Pelabuhan Teluk Bayur.

Studi Kelayakan Reaktivasi Jalur KA antara KAYU TANAM – BUKITTINGGI

1. Langkah Awal untuk Menyambungkan Kembali Jalur KA di Sumatera Barat;
2. Penyediaan opsi lain angkutan masal masyarakat.

Studi Kelayakan Reaktivasi Jalur KA antara KAYU TANAM – SAWAHLUNTO

1. Konektivitas Perkeretaapian sebagai Simpul Utama Transpotasi di Sumatera Barat;
2. Dukungan terhadap Rekomendasi WT BOS untuk Mengaktifkan Kembali Jalur KA.

Kesiapan :

1. Tanah (Aset Kemenhub)
2. Studi Kelayakan (Penyusunan 2025);
3. Trase (Setelah Studi Kelayakan);
4. Dukungan Pemerintah Daerah (?).

Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Ka Perintis Lembah Anai Tahun Anggaran 2025

Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang :

Pengoperasian Kereta Api Perintis Lembah Anai

1. Integrasi Transportasi Perkeretaapian ke Simpul Transpotasi Bandara Internasional Minangkabau;
1. Mendukung penyediaan transportasi masal yang terjangkau bagi masyarakat;
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat

Alokasi anggaran KA Perintis Lembah Anai sebesar Rp. 15.000.000.000 untuk dapat mengakomodir Penyelenggaraan Subsidi Angkutan KA Perintis Lembah Anai TA 2025 selama 12 bulan pengoperasian

Pemeliharaan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang TA. 2025 Rp. 81.934.727.000

Diskusi Tanya Jawab

Bappeda Kab. Agam

Bencana alam, untuk kegiatan SABO DAM 2025 apa sudah dianggarkan dan bagaimana teknisnya

Bappeda Dharmasraya

Terkait dengan kualitas air di Batanghari yang keruh, apa yang menjadi penyebabnya dan bagaimana tindak lanjut dari BWSS V?

Terkait dengan ruas Muaro Kalaban sampai Bungo Dharmasraya, tetapi masih belum ada menjadi usulan Balai Perkeretapiaan apakah masih belum ada perencanaan?

Fasilitas RP2KPKP dan sudah disulkan oleh Pemda ke TAPD

Bappeda Pasaman

1. Penanganan Batang Sumpur, 2022 sudah ada rencana dan dijanjikan 2023 ada dana 5 Milyar dan masih belum ada tindaklanjutnya masyarakat bertanya terkait penggantian lahan (apakah pengendalian batang sumpur masih berlanjut)
2. Inpres Jalan Daerah kira – kira apakah tetap harus menunggu keputusan dari Kemen PUPR atau ada teknis lainnya untuk dapat mengakomodir usulan dari daerah dimohonkan informasinya

Bappeda Lima Puluh Kota

1. Jalan Tanjung Pati Simpang Agam dari 7 Milyar menjadi 2,6 Milyar bagaimana kelanjutan dari 2 ruas jalan ini
2. Jalan Lari Sago Halaban Sitangkat sudah dialokasikan 39 Milyar apa tetap tidak terlaksana 2024 atau 2025 baru terealisasi
3. RPJMD 2021 – 2026 salah satu target adalah pembanguna jalan di Sarilamak (kendala waktu itu adalah pembebasan lahan yang dilakukan oleh daerah dan 50 Kota sudah melakukan survey terhadap bangunan yang terdampak) dan apa menjadi agenda di BPJN
4. Pengendalian Banjir Batang Sinamar Nagari Taram karena hujan sedikit langsung banjir tetappi realisasi masih belum terlihat dan apakah menjadi agenda 2025 mohon untuk difasilitasi oleh BWS V

Tanggapan BWS V

1. Kapasitas SABO DAM 250 m3
Sabo DAM 2024 : di sungai Pagi-Pagu pembangunan Groundsill 1 unit, Normalisasi Sungai dan Revetment dengan pagu 75 Milyar (masih dalam proses penyusunan RAB dan desain)
2025 : 8 unit (Sungai Batang Katiak di Kabupaten Agam 3 Unit, Sungai Batang Malana di Kabupaten Tanah Datar 3 Unit dan Sungai Batang Anai di Kabupaten Tanah Datar 2 Unit) 260 Milyar
2. Batang Sumpur (BWS V sudah mencoba untuk mengusulkan ke pusat dan akan mencoba lagi untuk diusulkan dan untuk sementara rencana kerja 2025 untuk Batang Sumpur masih belum diakomodir)
3. Batang Sinamar, karena salah satu RC yang belum terpenuhi oleh daerah yaitu terkait dengan lahan)
4. Air di Batanghari tetap keruh karena adanya peti, BWS V melalui TKPSDA Indragiri Akuaman terkait kondisi ini telah menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh para stakeholder dan dimohonkan dukungan dari Pemerintah Daerah terutama Kabupaten Dharmasraya karena BWS V tidak mempunyai sumberdaya untuk penindakan.

Tanggapan BPJN :

Preservasi Jalan Piobang Koto - Panjang R-007 dan Jalan Tanjung Pati - Simalanggang R-048 Tanjung Pati Piobang, sepanjang 7,5 km alokasi Rp. 24,967,279.000

Payakumbuh Sitangkai 98 Milyar (2 paket) :

- Preservasi Jalan Bts. Kota Payakumbuh - Sitangkai (Paket I) Rp. 49,299,899.000
- Preservasi Jalan Bts. Kota Payakumbuh - Sitangkai (Paket II) Rp. 49,406,898.000

Pelabaran Sarilamak ada kendala bebas lahan tidak hanya di atas kertas saja sehingga tidak ada kendala ketika eksekusi (bisa diusulkan tetapi keputusan tetap dari pusat)

Simpang Panti Muaro Rais lolos dari kementerian, untuk teknis adalah sesuai prosedur/SOP

Tanggapan Balai Teknis Perkeretaapian :

Sudah menyampaikan surat untuk ditampung terlebih dahulu di RIPNAS karena ada informasi revisi RIPNAS tahun 2024 sehingga sudah mengakomodir semua perkeretaapian di Sumatera Barat (Sumbar – Bangkulu, Dharmasraya – Jambi, Naras – Pasaman Barat)

Tanggapan BPPW :

Dari Perkim sudah berkoordinasi dengan BPPW dan untuk mengirimkan surat pernyataan minat pendampingan ke BPPW

Bappeda Mentawai

1. Kelanjutan ruas Sigapokna
2. Seawall Sikabalu, Pokai dan Mapadegat
3. Apa fokus BPPW 2025 di Mentawai

Tanggapan BPPW :

Sesuai dengan kebijakan bahwa TPA menjadi TPST, Untuk TPST Tua Pejat apakah Kab. Kep. Mentawai sudah ada perencanaan. (info Mentawai akhir Oktober sudah final) dan apabila sudah selesai untuk dapat berkoordinasi kembali dengan BPPW dan disesuaikan dengan kebijakan pada Direktorat Jenderal Sanitasi Kemen PUPR

Sesi II

Balai Penyediaan Perumahan Sumatera III

Bantuan PSU TA 2024, 2024, 6 lokasi pembangunan jalan lingkung 1.601,6 meter dan sedang dalam proses pemeliharaan dan hibah ke daerah.

Bantuan Stimulan Rumah Swadya 4.284 unit di 10 Kab./Kota

Tahap II, 99%, Tahap IV On going Tahap XIX baru selesai verifikasi

Bantuan Rumah Susun TA 2024

- Rumah Susun : Rusun Ponpes A Manaar ; proses serah terima aset
- Rusun Ponpes Tawalib Padang Panjang proses serah terima aset
- Pembangunan Lanjutan Rusun Pemkab. Sinjunjung, proses pengadaan mobiler (peruntukan untuk ASN)
- Rusun Universitas Dharmas Indonesia Kab. Dharmasraya
- Rusun Kejati, sudah serah terima kunci

Rumah Khusus 2024 terdiri atas :

1. Rumah Khusus Hunian Tetap Pasca Bencana Kab. Agam 80 unit, sudah teratap lebih dari 50%, struktur RISHA sudah terbangun)
2. Rumah Khusus Hunian Tetap Pasca Bencana Kab. Tanah Datar 60 unit, sudah teratap lebih dari 50%, struktur RISHA sudah terbangun)

Rencana Penyelenggaraan Bidang Perumahan Tahun 2025-2029

Rencana Kegiatan TA 2025

Target Alokasi Bantuan PSU 2025 Sumatera Barat 250 unit.

Usulan sementara yang disampaikan ke Ditjen Perumahan 740 unit dengan rincian :

1. Kab. Dharmasraya (Dharmas Regency) 93 unit
2. Kab. Dharmasraya (Dharmas Village) 70 unit
3. Kab. Dharmasraya (Mutiara Garden) 50 unit
4. Kab. Dharmasraya (Swarna Bhumi Resident II) 60 unit
5. Kab. Sijunjung (Wisma Prima Lestari) 100 unit
6. Kota Padang (Bumi Kasai Residence) 140 unit
7. Kota Padang (Bungo Pasang Asri) 119 unit
8. Kota Solok (Griya Devin Mandiri) 108 unit

Batas verifikasi PSU adalah 14 November 2024

BPTD

Kegiatan strategis 2024 :

1. Layanan Angkutan Jalan Perintis (7 Trayek) (Prioritas Nasional)
 - a. Pulau Punjung - Sei Rumbai - Sitiung III (Kab. Dharmasraya)
 - b. Pulau Punjung - Sikabau - Simp.3 Koto Baru – Ampalu (Kab. Dharmasraya)
 - c. Padang Aro - Uluh Suliti (Kab. Solok Selatan)
 - d. Terminal Simpang IV - Bateh Samuik (Kab. Pasaman Barat)
 - e. Tuapejat - Sioban (Kab. Kepulauan Mentawai)
 - f. Pariaman - Urek Kaji - P.Kambar - Parit Malintang - Kantor Bupati Pariaman (Kab. Padang Pariaman)
 - g. Poltekel Sumbar - Pasar Usang - Lubuk Alung - Parit Malintang - Kantor Bupati Pariaman (Kab. Padang Pariaman)
2. Layanan Angkutan Antarmoda KSPN Padang (4 Trayek) (Prioritas Nasional)
 - a. Muara Lasak (Padang) - Terminal Tipe A Anak Air - Bandar Udara Minang Kabau-Lembah Anai - Padang Panjang - Pandai Sikek - Bukit Tinggi
 - b. Terminal Tipe A Anak Air - Bandar Udara Minang Kabau - Pariaman (Via Ulakan) - Lubuk Basung – Maninjau
 - c. Muara Lasak (Padang) - Terminal Tipe A - Bandar Udara Minang Kabau - Solok - Danau Singkarak (Via Ombilin) - Istana Pagaruyung
 - d. Bandar Udara Minang Kabau - Terminal Tipe A Anak Air - Muara Lasak - Pantai Corocok
3. Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas Nasional)
 1. PADANG -SIKABALUAN dan TUAPEJAT - SIKAKAP
 2. PADANG -SIBERUT dan SIBERUT – TUAPEJAT

4. Peningkatan /Revitalisasi Fasilitas Darat Pelabuhan Penyeberangan Teluk Bungus (Prioritas Nasional)
5. Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Teluk Bungus Tahap IV Selesai (Sisi Perairan) (Prioritas Nasional)
6. Ketatalaksanaan Operasional dan Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan Berbasis *Excellent Service* Terminal Tipe A Anak Air Kota Padang
7. Pemeliharaan Alat Uji dan Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor
8. Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional)
9. Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan (ruas Jalan Protokol Prov. Sumbar), Kota Solok (Ruas Protokol Kota Solok), Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kab. Pasaman Barat, Kota Payakumbuh, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kab. Dharmasraya, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Agam, Kota Sawahlunto, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pasaman, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kab. Solok Selatan, Kab. Sijunjung
10. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK)
11. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)
12. Pengadaan Pemasangan Perlengkapan Jalan

Kegiatan Pagu Alokasi Anggaran TA 2025 BPTD KELAS II SUMATERA BARAT, terdiri dari :

INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT

Layanan Angkutan Jalan Perintis (7 Trayek)

- I. Padang Aro - Uluh Suliti (Kab. Solok Selatan)
- II. Tapan - Indrapura - Air Haji - Balai Salasa - Kambang - Surantih - Batang Kapas - Painan (Kab Pesisir Selatan) (Usulan Trayek Baru)
- III. Terminal Simpang Empat - Simpang 3 Ophir - Sungai Talang - Pasar Kapar - Pasar Sasak (Kab. Pasaman Barat) (Usulan Trayek Baru)
- IV. Terminal Simpang Empat - Ujung Gading (Kab. Pasaman Barat) (Usulan Trayek Baru)
- V. Pariaman - Urek Kaji - P. Kamar - Parit Malintang - Kantor Bupati Pariaman
- VI. Poltekel Sumbar - Pasar Usang - Lubuk Alung - Parit Melintang - Kantor Bupati Pariaman (Kab. Padang Pariaman)
- VII. Tua Pejat - Sioban - (Kab. Kepulauan Mentawai)

Layanan Angkutan Antar Moda KSPN Padang (6 Trayek)

1. Muara Lasak (Padang) - Terminal Tipe A Anak Air - Bandar Udara Minang Kabau - Padang Panjang - Bukittinggi - LimaPuluh Kota (Kawasan Wisata Lembah Harau)
2. Bandar Udara Minang Kabau - Terminal Tipe A Anak Air - Alahan Panjang - Muaro Labuah (Kawasan Saribu Rumah Gadang)
3. Bandar Udara Minang Kabau - Terminal Tipe A Anak Air - Muara Lasak - Geopark Silokek Sijunjung
4. Bandar Udara Minang Kabau - Terminal Tipe A Anak Air - Muara Lasak - Pesisir Selatan (Bukit Langkisau)
5. Terminal Tipe A Anak Air - Bandar Udara Minang Kabau - Pariaman (via Ulahan) - Tiku - Lubuk Basung - Danau Maninjau
6. Muara Lasak (Padang) - Terminal Tipe A Anak Air - Bandar Udara Minang Kabau - Pandai Sikek – Bukittinggi

□ Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas Nasional)

1. Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Perintis Pada Lintas Padang – Sikabalu & Tua Pejat - Sikakap
2. Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Perintis Pada Lintas Padang – Siberut & Siberut – Tua Pejat

KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT:

Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Nasional Provinsi Sumatera Barat

1. Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan Uk. 75 cm x 75 cm
2. Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan (Rambu Chevron)
3. Pengadaan dan Pemasangan Rambu Tiang F
4. Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan (Uk. 3x120 mm) (Thermoplastic) Putih
5. Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan Bulat (Tempered)
6. Pengadaan dan Pemasangan Delineator
7. Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman
8. Pengadaan dan Pemasangan APJ Solar Cel
9. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Peringatan Tenaga Surya
10. Pengadaan dan Pemasangan APILL Smart Simpang 3 (Tiga)

Dinas Perhubungan Prov. Sumbar

1. Trans Palapa dan Trans Payakumbuh sedang dilakukan penelitian dan sudah 80% dan diharapkan kepada BPTD untuk memberikan dukungan untuk 2 kawasan ini (untuk subsidi pelayanan)
2. Angkutan perintis, Mentawai dulu hanya sampai Rokot dan sekarang sudah penambahan lintasan ke Sioban sehingga anak sekolah tidak dapat lagi memnfaatkan transportasi massal ini, apa bisa dibagi trayeknya menjadi Tua Pejat Sioban, Sioban Tua Pejat
3. Angkutan bandara untuk diperpanjang lintasan sampai Bukittinggi Payakumbuh dan Solok
4. Angkutan perintis layanan Sungai Sungkai Rumbai dari hasil pemantauan demandnya cukup bagus tetapi dialihkan ke layanan lain untuk dapat diaktifkan kembali karena sebagai penghubung Solok Selatan dan Dharmasraya
5. Terkait daerah rawan kecelakaan (indeks kecelakaan lalu lintas) untuk berkoordinasi dengan kepolisian dan BPJN

Bappeda Kota Pariaman

1. Batang Anai II (debit air yang sampai ke kota pariaman tidak memenuhi banyak sawah yang tidak terariri, sawah menjadi sarang hama sehingga gaga panen pariaman bagian selatan, bagaimana tindak lanjut ini)
2. Perlintasan Sebidang yang belum ada palang dan rambu – rambu sehingga banyak kecelakaan

Tanggapan BPTD

1. Sedang mengajukan BRT Trans Sumbar
Awal November akan mengadakan Rakornis untuk menjaring usulan terkait transportasi darat dengan audien Dishub Prov dan Kab.Kota di Sumbar tanggal 4 November
BRT Trans Sumbar koordinasi dengan Pemda untuk pengagasan BRT Trans Sumbar
2. Perintis Mentawai BPTD concern untuk Mentawai tetapi kajian manfaat akan diteliti tentang apa yang diusulkan dan Mentawai tidak dihilangkan tetapi akan selalu dapat karena menjadi prioritas.
3. Usulan dari Mentawai ada RCnya yang lengkap dan ada yang tidak lengkap
4. Untuk pemandu moda sulit untuk diberikan subsidi karena di Bandara adalah Kelas Menengah ke atas
5. Untuk Perintis Solok Selatan sudah dilakukan review apabila law vactorynya sudah lebih 60% maka akan menjadi komersil dan perintis yang lebih 5 tahun untuk perpanjangan izin
6. Faskes Bantek WTN menunggu arahan pusat
7. Untuk diaktifkan kembali Forum LLAJ Sumbar

Tanggapan BWS V

DI Batang Anai Pengamatan I, jaringan BWS di TPOP kan dan di Dinas SDA BK dan bersurat ke satker 9 DI Kewenangan Pusat, apabila tersier pemeliharaan lebih ke partisipatif yang dilakukan oleh petani dan bisa diusulkan melalui program P3TGAI kerusakan di sekunder dan primer jaringan itu di Balai Pengaduan di 2 UPI Anai Penanganan untuk Batang Anai 2025 adalah Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Tanggapan Balai Teknik Perkeretapiaan

Balai Teknik Perkeretaapian sudah melalukan mitigasi rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk semua perlintasan yang masih belum ada palang (jangka panjang berusaha untuk melengkapi sarana prasarana dan perlu dukungan daerah untuk ini) Balai Teknik Perkeretaapian menunggu kajian teknis dari Kementerian Perhubungan terkait tindak lanjut lintasan yang masih belum ada palangnnya apakah apakah akan dibangun palang pintu atau EWS

Dinas Perhubungan Prov. Sumbar

1. Penambahan layanan dan frekuensi kereta tentang layanan kayu tanam ke Padang apa bisa 2025
2. Integrasi moda : Air Tawar 30 % lintasan Padang Pariaman, butuh perbaikan Stasiun Basko ini dan peningkatan pariwisata (penyediaan *shuttle bus* ke Pantai Padang, Pantai Air Manis)

Tanggapan Balai Teknik Perkeretaapian

Pergerakan penumpang pariwisata adalah Padang Pariaman, pergerakan penumpang Pariaman Padang adalah untuk pendidikan. Yang perlu ditingkatkan adalah kerjasama dengan Kota Padang untuk penambahan rute.

Untuk kayu tanam perlu dilakukan peningkatan jembatan (dan ditangani tahun 2024 dan dilanjutkan 2025) jangka panjang : kereta antar kota



7. Rapat Penyampaian Usulan Kegiatan Melalui Dana APBN TA 2026, 13 November 2024

Arahan Sekretaris Bappeda

Visi Misi Asta Cita BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045. Indonesia menjadi negara yang gemilang pada tahun 2045 ketika Indonesia merayakan seratus tahun kemerdekaannya. Serta keinginan untuk melihat Indonesia sebagai negara yang unggul di berbagai aspek kehidupan.

8 Misi ASTA CITA :

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan HAM
2. **Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Hijau, dan Biru**
3. **Meningkatkan Lapangan Kerja, Kewirausahaan, dan Pengembangan Infrastruktur**
4. Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, dan Peran Perempuan, Pemuda, serta Penyandang Disabilitas
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama

QUICK WINS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

PROGRAM UTAMA PRESIDEN DENGAN TOTAL 14 AGENDA :

Quick Wins 3

Mendukung Ketahanan Pangan (12 Agenda)

1. Bendungan (5 Agenda)
2. Irigasi (2 Agenda)
3. Konektivitas Mendukung *Food Estate* dan Sentra Pangan (5 Agenda)

Quick Wins 4

Revitalisasi Sekolah/Madrasah (2 Agenda)

1. Pembangunan Sekolah/Madrasah
2. Peresmian Renovasi Sekolah/Madrasah

PROGRAM STRATEGIS UNTUK MENDUKUNG PROGRAM UNGGULAN/STRATEGIS K/L LAINNYA DENGAN TOTAL 52 AGENDA

1. Giant Sea Wall 1 agenda

2. IKN 8 agenda

3. Konektivitas 14 agenda

Flyover (Madukoro, Canguk; Bantaian, Sekip Ujung); *Overpass* Balaraja Barat dan Rehabilitasi *Flyover* Cibodas; *Underpass* (Gatot Subroto, Joglo); Jembatan Sungai Sambas Besar; Duplikasi Jembatan (Liliba, Kr. Peudada); Jalan Tol (Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Sebagian Seksi 2 Kuala Tanjung-Inderapura, Ruas Binjai Langsa Seksi 3 Tanjung Pura - Pangkalan Brandan, **Padang – Sicincin**, Sigli-Banda Aceh Seksi I Padang Tiji – Seulimeum)

4. Pasar Rakyat 6 agenda

5. Air Minm 4 agenda

6. Sanitasi, Air Limbah, & Persampahan 4 agenda

7. Sarana Olahraga 6 Agenda

8. Penataan Kawasan 3 Agenda

9. Sarana Kesehatan dan Pendidikan 3 agenda

10. Lain-lain 3 Agenda

Kelanjutan Inpres Jalan Daerah (IJD), kelanjutan Inpres air Minum dan Air Limbah (AMAL), dukungan Inpres Irigasi

TAHAPAN TARGET UTAMA INFRASTRUKTUR PU JANGKA MENENGAH 2025-2029

Output/Outcome	Satuan	2025	2029
Kapasitas Tampung melalui pembangunan bangunan penampung air, revitalisasi embung, inovasi waduk muara, desalinasi, dsb	m ³ /cap/tahun	65,18	70
Waktu Tempuh Lintas Utama melalui pembangunan jalan baru dan peningkatan kemantapan jalan	jam/100 km	2,2	1,7
Akses Air Siap Minum Perpipaan melalui pembangunan IPA, pelarangan penyedotan air tanah, optimalisasi SPAM	%	39,2	51,36
Sanitasi Aman melalui pembangunan regional <i>sewerage system</i> untuk metropolitan	%	12,5	30
Sampah terolah perkotaan melalui Pembangunan TPS 3R, Waste to Energy, RDF, dll	%	24 terolah 16 daur ulang	38 terolah 20 daur ulang

3 STRATEGI DALAM PENYUSUNAN PROGRAM INFRASTRUKTUR PU TAHUN ANGGARAN 2026

1. Mempedomani Asta Cita, antara lain fokus pada swasembada pangan dan air, hilirisasi industri, pembangunan perkotaan dan perdesaan, hingga pemerataan wilayah
2. Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur terbangun agar segera bermanfaat untuk masyarakat
3. Meningkatkan kerja sama lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mencapai target-target pembangunan nasional di bidang infrastruktur

SKENARIO PENGEMBANGAN WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT

No.	Fokus	Isu Strategi	Strategi
1	Pengembangan Infrastruktur Wilayah Fokus Perkotaan	Belum optimalnya infrastruktur Perkotaan dalam mewujudkan Kawasan Metropolitan yang Kompak berbasis Resilient City	<ul style="list-style-type: none"> • S2,S3-O1,O3 Pemenuhan infrastruktur dasar dalam mendukung Kawasan Megapolitan Palapa • S1,S2-O1,O2,O3,O4 Optimalisasi simpul dan jaringan transportasi sebagai upaya penguatan konektivitas antara pusat Metropolitan Kota Padang dan Kota Satelitnya • S3,S4-O5 Mendorong pengembangan Kawasan perkotaan Palapa dengan Konsep Resilient City yang memperhatikan mitigasi, adaptasi, dan respons terhadap bencana

**LAPORAN AKHIR KOOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2024**

2	Pengembangan Infrastruktur Wilayah Fokus Pariwisata	Pengembangan Tematik Pariwisata yang belum terintegrasi antar destinasi dan dengan industri kreatif	<ul style="list-style-type: none"> • S1,S2,S3,S4-O1,O2,O5 Pengembangan citra destinasi wisata yang terintegrasi dengan industri kreatif lokal untuk menarik lebih banyak wisatawan melalui atraksi dan peningkatan kelembagaan • S1,S2,S4-O1,O3 Pengembangan aksesibilitas transportasi untuk mendorong konektivitas kawasan dalam rangka mendukung kegiatan wisata • S2,S3-O1 Pengembangan amenities dan infrastruktur dasar di kawasan pariwisata
3	Pengembangan Infrastruktur Wilayah Fokus Pertanian	Penetapan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Agam didukung oleh Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • S1,S2-O2-O3 Peningkatan produktivitas melalui dukungan infrastruktur pertanian • S3-O4,O5 Pengembangan UMKM dan agro industri pertanian melalui penetapan KPPN, teknologi, dan penguatan SDM • S1,S2-O1 Peningkatan konektivitas jalur pemasaran untuk mendukung distribusi hasil pangan keluar Sumatera melalui hub di Pasaman Barat dan ke dalam Pulau Sumatera
4	Pengembangan Infrastruktur Wilayah Fokus Kawasan Daerah Tertinggal	Masih rendahnya konektivitas dan infrastruktur dasar di Kab. Kep.Mentawai	<ul style="list-style-type: none"> • S1,S2-T1,T3 Peningkatan jaringan intra dan antar wilayah untuk mendukung konektivitas orang dan barang di Provinsi Sumatera Barat • S3-T2 Penyelenggaraan sarana dan prasarana pada daerah terluar maupun tertinggal • S3-T4 Peningkatan SDM yang berdaya saing dan melek teknologi • S2-T5 Integrasi berbagai jenis moda transportasi serta peningkatan kualitas transportasi darat, laut, udara, dan kereta api

Sesi I

BPJN :

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR (INFRASTRUKTUR
BINA MARGA)

No	Kab/Kota	Usulan	Kawasan Prioritas	Keterangan
1	Kota Padang	Pembangunan Jalan Tol ruas Pangkalan (Tj. Alai) - Sicincin (Kapalo Hilalang)	Kawasan Perkotaan Palapa	RC Tol Sicincin sudah selesai, lahan yang terkait dengan tol
		Peningkatan kinerja pelayanan jalan ruas Prof. Dr. Hamka	Kawasan Perkotaan Palapa	merupakan program tahunan dari BPJN termasuk dalam preservasi jalan dan jembatan
		Peningkatan kinerja pelayanan jalan ruas Jalan Bukit Putus - Bts. Kota Padang	Kawasan Perkotaan Palapa	Km eksisting jalan apabila ada wacaana alih trase mohon untuk disiapkan Rcnnya program tahunan dari BPJN
		Pembangunan Perlintasan KA Tabing	Kawasan Perkotaan Palapa	Km perlintasan sebidang (Duku BIM Fly Over Tabing dan Lubuk Buaya RC, Desain Larap sudah selesai membutuhkan anggaran 400 Milyar, status lahan status terakhir 2021 membutuhkan anggaran 26 Milyar berdasarkan kajian LARAP, dan ada hambatan dari masyarakat. untuk Desain, Andalalin akan dibuat 3 fase (2025 – 2029 → Duku BIM dan sudah masuk RENCUM, Tabing Lubuak Buaya Fase II)
2	Kab. Padang Pariaman	Peningkatan kinerja pelayanan jalan ruas Lubuk Alung - Simp. Duku	Kawasan Perkotaan Palapa	Km jalan nasional yang ada apakah pelebaran lajur masih efektif karena dengan adanya tol efektifitas akan berubah
		Pembangunan Fly Over Duku - BIM	Kawasan Perkotaan Palapa	sudah dimasukkan dalam RENCUM 2025 – 2029 dan Bppenas
		Pembangunan perlintasan tidak sebidang (KA) Lubuk Alung - Sp. Duku (Lubuk Buaya)	Kawasan Perkotaan Palapa	sudah dimasukkan dalam RENCUM 2025 – 2029 dan Bppenas
3	Payakumbuh	Peningkatan kinerja pelayanan jalan ruas K.H. Ahmad Dahlan	Non Kawasan	pelebaran menambah lajur akan dianalisis dulu target kemandapan jalan sumbar 91,12% VCR dibawah 0,8% belum memenuhi untuk penambahan lajur

4	Kab. Kep. Mentawai	Relokasi jalan nasional ruas Sioban - Katiet	Daerah 3T Mentawai	Sioban Katiet 32 KM untuk alih trase sudah dkaji
		Pembangunan Jalan Trans Mentawai ruas Labuhan Bajau - Sirilanggai	Daerah 3T Mentawai	sudah menjadi prioritas bagi BPJN dan sudah ada di RENCUM 2025 - 2029
		Pembangunan Jalan Trans Mentawai ruas Sigapokam - Sirilanggai	Daerah 3T Mentawai	penanganan ruas ini butuh anggaran yang sangat besar dan sudah masuk dalam program jangka panjang
		Pembangunan Jalan Trans Mentawai ruas Sirilanggai - Mailepet	Daerah 3T Mentawai	
		Pembangunan Jalan Trans Mentawai ruas Mailepet - Mabukuk	Daerah 3T Mentawai	
5	Bukittinggi	Peningkatan kinerja pelayanan jalan ruas SP. Aur Kuning - SP. Taluk	KSPN Bukittinggi	sudah menyiapkan rencana fly over Padang lua (DED, andalalin sudah siap dan terkendala lahan keterbatasan lahan seperti adanya pasar
6	Kab. Agam	Peningkatan kinerja pelayanan jalan BTS. KOTA PAYAKUMBUH - BASO	KPPN Agam	RC sudah siap preservasi jalan dan jembatan

PR di Sumatera Barat : Terminal Anak Air karena aksesnya sudah masuk RENCUM 2019 30 Milyar sudah ada anggaran namun terkendala pembebasan lahan (pada kondisi sekarang untuk pembebasan lahan dibutuhkan biaya 50 Milyar)

Tanggapan Kabupaten/Kota

Bappeda Kota Payakumbuh

Peningkatan kinerja pelayanan jalan ruas K.H Ahmad Dahlan, Kota Payakumbuh sudah pernah melakukan penghitungan terhadap kinerja pelayanan jalan ruas K.H Ahmad Dahlan dengan hasil adalah 0,8% dan apakah hasil yang telah dihitung ini bisa digunakan sebagai rekomendasi bagi BPJN untuk menindaklanjuti terkait usulan pada ruas ini?

BPJN :

Untuk VCR dihitung oleh BPJN

Terkait usulan Peningkatan kinerja pelayanan jalan ruas K.H Ahmad Dahlan, diperoleh hasil VCR masih kurang 0,8% dan apabila hasilnya lebih dari 0,8% belum tentu akan langsung dieksekusi oleh BPJN karena ketersediaan lahan juga menjadi prioritas utama.

BPTD

BPTD sudah melaksanakan rapat koordinasi teknis pada Kamis, pada perhubungan ada program bantuan teknik pembiayaan yang bisa di ruas jalan kabupaten/kota memberi kesempatan kabupaten kota untuk penanganan perlintasan sebidang baru 4 kabupaten kota yang mengajukan program bantuan teknis.

BPTD masih menunggu usulan dari kabupaten/kota

Terkait akses terminal anak air → BPTD sudah mengirimkan surat permohonan kepada provinsi terkait akses jalan ini bisa dilaksanakan dimohonkan kepada Bappeda untuk memfasilitasi ini.

Bappeda Kota Padang

Terkait akses Terminal Anak Air, Pemerintah Kota Padang sudah merencanakan pembebasan lahan dan sudah tertuang dalam RPJMD Kota Padang 2019 – 2024, pada tahun 2019 dianggarkan 25 Milyar, 2020 dianggarkan 25 Milyar dan 2021 dianggarkan 10 Milyar (2019, 2020, 2021) dan namun karena adanya COVID dan dilakukan refocusing pada beberapa kegiatan Pemerintah Kota Padang dan salah satunya adalah anggaran pembebasan lahan ini.

Tindak lanjut yang sudah diambil oleh Kota Padang adalah dengan tetap merencanakan penganggaran untuk pembebasan lahan ini dan sudah dibahas pada rapat TAPD, dimana dengan kondisi sekarang untuk pembebasan lahan akses terminal anak air dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 80 Milyar karena pembebasan MTSN yang disebelah kanan Adinegoro dan dimohonkan kepada Kementerian PU untuk tidak dikeluarkan dari RENCUM)

Usulan Kota Padang (sudah dibuat proposal antara Kota Padang dan Padang Pariaman untuk menunjang Kawasan PALAPA tapi realisasinya belum terlaksana sehingga proposal diluar yang ada pada RPIW apa boleh diusulkan)

Tanggapan BPJN

Lahan akses terminal anak air sudah masuk pada RENCUM 2025 – 2029, namun untuk sementara dikeluarkan dulu dari RENCUM, karena pekerjaan fisik tidak boleh beririsan dengan pembebasan lahan.

Tanggapan Dharmasraya

Rencana Aksi RPIW belum mengakomodir bagian selatan Sumatera Barat

Alahan Panjang Kiliran Jao

Sei Rumbai Solok Selatan

Longsegment Simpang Sikabau - Tebo

Sijunjung - Dharmasraya

Pesisir Selatan - Dharmasraya

pada kondisi sekarang waktu tempuh Dharmasraya Padang waktu tempuh ± 10 Jam

Dharmasraya - Sijunjung ± 2 jam

dimohonkan kepada BPJN untuk memperhatikan bagian selatan Sumatera Barat

Tanggapan BPJN

masih berproses, keterlibatan BPJN terhadap RPIW juga

BPJN punya PR 8% target kemantapan jalan yang harus dicapai sepanjang 126 km, ruas yang menyebabkan ketidak tercapaian kemantapan jalan : Muaro Kalaban, Mentawai, Lubuk Selasih, Solok Selatan

Rencana Kerja BPJN :

2025 : MYC 2025 – 2027 Tanah Badantung Kiliran Jao, Sei Dareh

2021 Kemen PU sudah menyampaikan usulan Rengat - Dharmasraya pada Kemenkomaritim, namun saat ini yang menjadi prioritas utama Sumatera Barat dalam jalan bebas hambatan adalah penuntasan Tol Pekanbaru – Padang.

Pasar Baru Alahan Panjang, Alahan Panjang Kiliran Jao → kewenangan provinsi dan sudah ditangani dengan PHJD, dan tahun 2025 telah masuk dalam penganggaran RAPBD 2025 Sumatera Barat.

Ruas Sungai Lok Batu Sandi dan Ruas Sungai Rumbai - Dharmasraya → dilakukan penanganan dengan IJD 2024

Sumar IJD → 23 Milyar

BWS V

No	Kab/Kota	Usulan	Kawasan Prioritas	Readiness Criteria
1	Kota Padang	Rehabilitasi Intake Air Baku Kota Padang	Kawasan Perkotaan Palapa	FS, DED dan Dockling lahan sudah tersedia Air Baku Ulu Gadut RC sudah lengkap dan sudah diusulkan dalam Renstra
		Pembangunan Air Baku Batu Busuak Kota Padang	Kawasan Perkotaan Palapa	FS, DED dan Dockling sudah tersedia
		Pengendalian Banjir Batang Kandis Lanjutan	Kawasan Perkotaan Palapa	Lanjutan kegiatan UFCS Phase II sudah masuk dalam program BWS V
		UFCSI Phase II - Padang Sub Project	Kawasan Perkotaan Palapa	RC perlu disiapkan
	Kota Padang & Kab. Padang Pariaman	Pengendalian Banjir Batang Kasang	Kawasan Perkotaan Palapa	Desain perlu di reviu RC belum lengkap, kelengkapan di pembebasan lahan (butuh sertifikat dan surat hibah)
2	Kab. Padang Pariaman	Pembangunan Pengaman Pantai Kabupaten Padang Pariaman	Kawasan Perkotaan Palapa	RC perlu disiapkan
3	Kota Pariaman	Pembangunan Pengaman Pantai di Kota Pariaman (Lanjutan)	Kawasan Perkotaan Palapa	RC perlu disiapkan
4	Kab. Kep. Mentawai	Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Sirilanggai Siberut Utara	Daerah 3T Mentawai	review desain dari mentawai
		Pembangunan Embung Kepulauan Mentawai	Daerah 3T Mentawai	RC perlu disiapkan
		Pembangunan Pengaman Pantai di Kabupaten Kepulauan Mentawai	Daerah 3T Mentawai	RC perlu disiapkan
5	Bukittinggi	Pembangunan Bangunan Penyediaan Air Baku di Kota Bukittinggi	KSPN Bukittinggi	RC perlu disiapkan
6	Kab. Agam	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di Kabupaten Agam	KPPN Agam	RC perlu disiapkan
		Peningkatan DI. Batang Antokan	KPPN Agam	RC perlu disiapkan sudah diusulkan
		Pembangunan Saluran Tersier DI. Batang Antokan	KPPN Agam	RC perlu disiapkan

**LAPORAN AKHIR KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2024**

		Revitalisasi Danau Maninjau	KPPN Agam	Pembangunan check dam
7	Kab. Solok	Pengembangan intake	Non Kawasan	lokus tidak jelas
		Revitalisasi Danau Singkarak	Non Kawasan	RC perlu disiapkan sudah tempung di 2025
		Pembangunan Air Baku Danau Diatas	Non Kawasan	RC perlu disiapkan
8	Kab. Solok Selatan	Pembangunan Bangunan Penyediaan Air Baku di Kabupaten Solok Selatan	Non Kawasan	RC perlu disiapkan
		Pembangunan Sarana/ Prasarana Pengendalian Banjir dan Sedimen Batang Suliti Kabupaten Solok Selatan	Non Kawasan	FS, DED, Dockling, dan Lahan tersedia
		Pembangunan Sarana/ Prasarana Pengendalian Banjir dan Sedimen Sungai Batang Sangir Kabupaten Solok Selatan	Non Kawasan	RC perlu disiapkan
9	Kabupaten Pasaman Barat	Pembangunan DI. Batang Bayang (6.500 Ha) di Kab. Pasaman Barat	Non Kawasan	FS, DED, Dockling, dan Lahan tersedia
		Peningkatan DI. Batang Tongar Kabupaten Pasaman Barat	Non Kawasan	RC perlu disiapkan akan dikoordinasikan kembali
10	Kab. Pesisir Selatan	Pembangunan DI. Lubuk Buaya Kabupaten Pesisir Selatan	Non Kawasan	RC perlu disiapkan akan dikoordinasikan kembali
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengamanan Pantai Air Haji di Kabupaten Pesisir Selatan	Non Kawasan	RC perlu disiapkan akan dikoordinasikan kembali
		Pengendalian Banjir Batang Tapan Kabupaten Pesisir Selatan	Non Kawasan	RC perlu disiapkan akan dikoordinasikan kembali
		Pembangunan Sarana Pengaman Pantai Ampiang Parak Lanjutan Kabupaten Pesisir Selatan	Non Kawasan	RC perlu disiapkan akan dikoordinasikan kembali
11	Kota Payakumbuh	Pengendalian Banjir Batang Agam di Kota Payakumbuh (Lanjutan)	Non Kawasan	RC perlu disiapkan akan dikoordinasikan kembali
12	Kab. Pasaman	Pengendalian Banjir dan Pengendali Sedimen Batang Sumpur (berserta anak sungainya) di Kabupaten Pasaman	Non Kawasan	RC yang sudah disiapkan Batang Sumpur DED oleh BWS V. RC yang harus dipenuhi oleh Kabupaten Pasaman adalah terkait lahan, lahan bersertifikat dan ada surat hibah yang di tanda tangani oleh Pemilik Lahan, Perangkat Nagari Ninik Mamak, KAN
		Pembangunan Bangunan Penyediaan Air Baku di Kabupaten Pasaman	Non Kawasan	RC perlu disiapkan akan dikoordinasikan kembali

Tanggapan Mentawai

Sikabalu, mohon untuk menunjang destinasi wisata di Mapadegat (Pengaman Pantai Mapadegat)

Tanggapan Kabupaten Tanah Datar

Pembangunan sabo dam di sungai yang ber hulu di Gunung Marapi dan mengarah ke Tanah Datar

Bagaimana mengatasi kemacetan di Pasar Koto Baru dan lintasan sebidang dan jalan alternatif dari Ombilin Batusangkar

Konektivitas destinasi wisata Sawahlunto Tanah Datar Bukittinggi

Tanggapan BWS V

BWS V sudah membuat Kajian Danau Singkarak 2022,

Tahun 2025 pelaksanaan konstruksi Sabo untuk 8 unit Sabo dilokasi : Sungai Batang Katiak di Kabupaten Agam 3 Unit, Sungai Batang Malana di Kabupaten Tanah Datar 3 Unit dan Sungai Batang Anai di Kabupaten Tanah Datar 2 Unit dengan pagu anggaran 75 Milyar

Bappeda Kabupaten Pasaman

Penanggulangan Banjir Batang Sumpur :

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman sejak tahun 2023 sudah diminta untuk mempersiapkan ganti rugi lahan dan sudah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dengan mensosialisasikan kepada masyarakat dan masyarakat sudah setuju

Berdasarkan hasil koordinasi kami dengan BWS V, disampaikan bahwa ganti rugi lahan akan dilaksanakan pada tahun 2024 ini, namun sampai dengan sekarang untuk ganti rugi lahan ini masih belum dilaksanakan oleh BWS V, kami mohon informasinya apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan ganti rugi lahan ini?

Untuk RC yang harus dipenuhi, apa saja bentuk RC yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah?

Begitu juga dengan Embung Sumpahan

Bappeda Kota Swahalunto

Pengendalian Banjir Batang Lunto, untuk lahan Pemerintah Kota Sawahlunto sudah melakukan pembebasan lahan, mohon informasi lebih lanjut?

BWS V

Untuk Batang Lunto dan Embung Sumpahan akan diusulkan 2026 dalam Renja BWS V Untuk RC yang sudah disiapkan Batang Sumpur DED oleh BWS V, RC yang harus dipenuhi oleh Kabupaten Pasaman adalah terkait lahan, lahan bersertifikat dan ada surat hibah yang di tanda tangani oleh Pemilik Lahan, Perangkat Nagari Ninik Mamak, KAN (akan kami koordinasikan kembali)

Bappeda Sijunjung

Muara Tigo Sungai, RSUD Sijunjung dan BWS sudah melakukan survey dan akan dilakukan normalisasi

Bappeda Kabupaten Solok

Pengembangan Intake, Kabupaten Solok mengusulkan Intake Muara Panas

Bappeda Pasaman Barat

Bendungan Lubuk King, jaringan sampai ke Batang Bayang kondisi Lubuk King bangunan sudah mulai rusak dan sebagai tempat wisata apa bisa dimasukkan ke fokus pariwisata dan dimohonkan ke provinsi terkait dengan Lubuk King ini.

Jaringan irigasi Batang Bayang pembebasan lahan tahap 2 akan dilanjutkan tahun 2026 untuk infrastruktur jalan pasaman barat tidak ada dalam Rencana Aksi RPIW.

Terkait pembangunan jalan ke Pelabuhan Teluk Tapang yang tinggal 5 km dan rencana kemen perhubungan akan membangun sarana pelabuhan untuk menjadi prioritas provinsi untuk penyelesaian ini.

Tanggapan BPJN

5 km → ditinggalkan karena masih ada permasalahan lahan dan hukum yaitu terkait penambangan biji besi yang dilakukan oleh PT. GMK, BPJN akan melakukan pekerjaan kembali apabila permasalahan ini sudah tuntas.

BWS V

Pekerjaan di Lubuk King pada 2024-2025 BWS V masih belum ada kegiatan

SDA BK

Dibutuhkan Pembangunan Kolam Retensi Maransi untuk pengendalian banjir Kota Padang

Batang Kandis Lanjutan

Pembangunan Bendungan di Hulu Batang Mahat untuk pengendalian banjir Lima Puluh Kota Pangkalan

BWS V

50 Kota : Batang Sinamar dan Batang Mahat sudah dimasukkan dalam list usulan 2026 Pembangunan Kolam Retensi Maransi masih belum disulkan

Bappeda Kota Pariaman

Usulan Pengendali Banjir Kota Pariaman

Penngendali Batang Magor kapan diakomodir

Tanggapan BWS V

Desain Batang Magor sedang dikerjakan

2025 Pembangunan Pengendali Banjir Batang Mangor 20 Milyar

PU Kota Padang

Untuk Batang Maransi, Kota Padang telah merencanakan normalisasi dan kolam retensi batang maransi Kota Padang sudah ada perencanaan
Banjir Kota Padang sudah membuat perencanaan normalisasi Cimpago pompanisasi dan disamping hotel pangeran RC sudah siap)

Tanggap BWS V

akan diusulkan dan untuk terus berkoordinasi

Balai Penyediaan Perumahan Sumatera III

Balai Penyediaan Perumahan Sumatera III masih dalam proses penyusunan renstra

Bappeda Kota Sawahlunto

Apakah masih bisa mengusulkan rusun POLRI

Balai Penyediaan Perumahan Sumatera III

Usulan harus melalui SIBARU, Rusun sawahlunto 2022, perlu di lakukan pembaharuan usulan

Rusun Mahasiswa belum ada kejelasan

BPPW

Kab. Padang Pariaman

Pengembangan TPA Padang Pariaman (belum ada lokasi)

Pembangunan SPAM Padang Pariaman (belum ada Mou ko pariaman padang pariaman)

Pengembangan SPAN Padang Pariaman

Kota Padang

TPST sudah dilaksanakan 2024 dan 2025

Pembangunan SPAM Perkotaan Palapa

Kota Pariaman

Pembangunan SPAM

Mentawai

Pembangunan TPST Mentawai (belum ada RC, yang baru ada RC TPA), Mentawai janji untuk menyiapkan ini)

SPAM 3 T RC belum ada

Bukittinggi

Pembangunan SPAM

Agam

Optimalisasi TPA Sungai Jariang, dimasukkan 2026, RC sudah (akan direview kembali)

Kota Sawahlunto

Pembangunan IPLT Sawahlunto
lokasi mohon untuk di cek ulang

Pembangunan SPAM regional 50 Kota Payakumbuh

BPPW usulan akan aplikasi SPKP dan akan tutup tanggal 15 November jam 18.00 WIB
Kawasan kumuh yang ditangani : Bukittinggi Limpo, Tanah Datar Kawasan Baringin
Pusat Kota dan Pesisir Selatan Painan Selatan

BPTD

tupoksi pelayanan keselamatan jalan nasional
program keperintisan : subsidi angkutan perintis

Sumbar : KSPN dan mengjangkau daerah yang tidak ada angkutan umum dan subsidi penyeberangan bungus mentawai

Bantuan teknis : fasilitas kelemtan jalan dan rambu, pelintasan sebidang

BPTD sudah clear tgl 7 - 8 sudah rapat program 2026 dari kab./kota
usulan 2026 sudah clear dan BPTD butuh dukungan dari bappeda kab./kota dan provinsi
untuk dapat menyiapkan lahan (tanah diserahkan dulu ke BPTD selama pembangunan
dan setelah selai pembangunan diserahkan kembali ke pemda), FS, DED tanggung
jawab pemerintah daerah

ATCS : wilayah untuk pengaturan lebih (Kota Padang, Padang Panjang, Bukittinggi
(program yang diserahkan ke kab./kota

Kabupaten Kota yang sudah menyampaikan usulan ke BPTD : Kab. Pasaman, Sijunjung,
Kota Oyakumbuh dan Kab. Pesisir Selatan (masih menunggu sampai 30 November)

Balai Perkeretaapiaan

1. Pembangunan Jalur Naras Pasaman (harus ada kajian kelayakan terlebih dahulu dan harus ada penetapan trase) 2025, layak atau tidak tergantung kajian termasuk jalur
2. Kayu Tanam Payakumbuh Kayu Tanam (2025 → Renstra dan pengusulan tambahan karena 2025 tidak akan ada pembanngunan fisik karena diwajibkan untuk menginvetarisasi semua kegiatan maka harus ada kajian terlebih dahulu maka kegiatan tambahan kajian : pembangunan lintas jalan lubuk alung pasaman)
3. Lintas padang kayu tanam (januari penambahan rangkaian Pauh Lima – Naras menjadi 14 perka, beroperasi Kayu Tanam – Padang dengan 6 perka untuk mengakomodir permintaan masyarakat)
4. Shortcut Padang Solok (belum ada ada dukung dari provinsi → KAK, RAB)
5. Pengoperasian posisi trase yang tidak aktif (kayu tanama padang panjang bukitnggi → kereta di atas 2027
6. 2026 studi kelayakan pengaktifan kembali rute yang tidak aktif, penambahan rute

Bappeda Kota Sawahlunto

Reaktivasi atau penambahan rute muaro kalaban solok

Balai Perkeretaapian

Penetapan trase sampai Sawahlunto tidak ada, penetapan trase menjadi dasar pengoperasian kereta api

BPTD

Terminal Tipe A Jati Kota Pariaman → akan membuat kajian untuk semua terminal tipe A di Sumatera Barat

seluruh terminal secara bertahap akan ditangani sesuai dengan arahan Kementerian Perhubungan

Revitalisasi Terminal Tipe A sedang pengusulan studi DED tahun 2025, studi dilaksanakan oleh pusat dan terminal jati pariaman akan banyak berkoordinasi dengan pemda karena dibelakang terminal itu aksesnya damkar yang dalam terminal masih dari terminal tipe A dan kesulitan dalam drainase dan sudah ada penanganan rehabilitasi dari BPTD



8. Studi Banding Bapemperda DPRD Provinsi Jambi, 25 November 2024

Pimpinan Sidang Rapat membuka kegiatan Studi Banding Bapemperda DPRD Provinsi Jambi dan memperkenalkan tim penyusunan Perda No 1 Tahun 2023 tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat dan meminta Tim DPRD Provinsi Jambi menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan Studi Banding Bapemperda DPRD Provinsi Jambi.

Tim Bapemperda DPRD Provinsi Jambi menjelaskan maksud dan tujuan studi banding antara lain sebagai berikut:

1. Tim Bapemperda DPRD Provinsi Jambi sedang menyusun Ranperda Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan yang merupakan inisiatif dari Komisi III DPRD Provinsi Jambi
2. Berdasarkan hasil pencarian di Internet, Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Perda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan pada tahun 2023 sehingga perlu mendapatkan informasi proses penyusunan hingga menetapkan menjadi perda. Dan untuk ini, menurut kami, Provinsi Sumatera Barat satu-satunya yang telah menetapkan perda ini.

A. Pelaksanaan Rapat

Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan menjelaskan proses penyusunan hingga penetapan Perda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Pada awalnya Perda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan merupakan inisiasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 dan dimintakan kepada Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk melanjutkan proses penyusunan Peraturan Daerah Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.
2. Proses Penyusunan Peraturan Daerah Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan ini dimulai dengan penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.
3. Kemudian dilanjutkan dengan Penyusunan Ranperda Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan pada tahun 2020 dan sudah masuk dalam agenda propemperda tahun 2020 namun proses ini terhenti karena adanya Pandemi COVID -19 dan anggaran yang sudah ada dalam DPA dirasionalisasi dan dialihkan untuk penanganan COVID -19.
4. Proses ini dilanjutkan ke tahun 2021 namun terhenti juga karena Pandemi COVID -19 dan anggaran yang sudah ada dalam DPA dirasionalisasi dan dialihkan untuk penanganan COVID -19.
5. Kemudian pada tahun 2022 proses Ranperda ini dilanjutkan dan telah menjadi Propemperda pada tahun 2022 serta dilakukan studi banding dan konsultasi ke Kementerian termasuk Kemendagri da pada akhir tahun 2022 Kemendagri mengeluarkan surat rekomendasi bahwa untuk Ranperda Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan telah dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2023 tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.
6. Dalam Perda memuat tentang keberlanjutan pembangunan infrastruktur baik itu perencanaan pembangunan infrastruktur dan infrastruktur yang sudah terbangun namun belum selesai. Perda Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan memuat tentang Infrastruktur Energi Baru dan Terbarukan,

Infrastruktur Bangunan Gedung, Infrastruktur Sumber Daya Air, Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi, Infrastruktur Sarana Perhubungan

B. Diskusi

Dalam kegiatan ini terdapat pertanyaan dari anggota DPRD Provinsi Jambi yaitu

1. Bagaimana proses agar Perda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan ini dapat terregister di Kemendagri karena menurut kemendagri bahwa perda ini tidak urgen dan harus berdasarkan UU yang memerintahkannya
2. Apakah Perda ini tidak tumpang tindih dengan Tupoksi OPD terkait?
3. Apakah perda ini sudah berfungsi atau berjalan pada tahun 2024 ini?
4. Bagaimana pengendalian, pengawasan dan pelaporan diatur dalam Perda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan?

Tanggapan /jawaban dalam diskusi sebagai berikut

1. Proses penyelesaian Perda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan cukup lama dari tahun 2020 hingga tahun 2022 dan baru pada 2023 ditetapkan sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kemendagri terkait persetujuan untuk penetapan Perda Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan dan disini selain Bappeda, Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat juga berperan penting dan untuk informasi lebih lanjut baiknya berkoordinasi dengan Biro Hukum Setda Prov. Sumbar.
2. Perda bertujuan untuk membantu tupoksi OPD dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat sehingga tidak ada lagi kegiatan/proyek yang nangkrak/terbengkalai.
3. Tindak lanjut dari Perda Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan ini adalah membuat Rencana Aksi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat belum menindaklanjutinya karena belum ada peraturan turunan karena disebabkan oleh pada saat ini difokuskan untuk penyusunan RPJPD dan tahun selanjutnya terkait RPJMD
4. Proses pengendalian, pengawasan dan pelaporan telah diatur dalam Perda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

C. DOKUMENTASI



BAB III PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Tahun 2024 telah diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi antara lain :

1. Usulan yang disampaikan baik itu melalui pendanaan DAK, APBN ataupun sumber pendanaan lainnya tidak sesuai dengan tema, renstra ataupun rencana kerja K/L yang telah ditetapkan.
2. Usulan yang disampaikan itu melalui pendanaan DAK, APBN ataupun sumber pendanaan lainnya terkait kelengkapan *Readiness Criteria* masih belum lengkap terutama terkait lahan
3. Terkait dengan AKSARA Bappenas, dalam penginputan data membutuhkan proses yang panjang seperti proses input oleh OPD, proses persetujuan kegiatan oleh Bappenas dan proses finalisasi oleh Bappeda Prov Sumbar dan baru bisa dilakukan setelah kegiatan disetujui oleh Bappenas.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

1. Perencanaan pembangunan merupakan hal penting untuk pencapaian tujuan pembangunan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan (*sustainable development*). Perencanaan merupakan salah satu dari aspek manajemen disamping pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*), sedangkan pembangunan secara umum menganut tiga paradigma, yaitu pertumbuhan (*growth*), perbaikan (*improvement*), dan perubahan (*change*).
2. Dalam proses perencanaan dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk mendukung perencanaan serta harus mengakomodir kebijakan pusat serta mempertimbangkan kebijakan ditingkat Kabupaten/Kota, dengan demikian diharapkan terwujud sinkronisasi, kesesuaian dan konsistensi perencanaan ditingkat pusat dan daerah.
3. Tujuan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur adalah :
 - Mewujudkan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan lingkup bidang infrastruktur antar perangkat daerah, pusat dan kabupaten/kota.
 - Mendukung perencanaan dan program kerja dari sumber pendanaan APBN dan sumber pendanaan lainnya.
 - Mendukung ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan infrastruktur.

4.2. REKOMENDASI

1. Daerah untuk mempersiapkan semua readiness criteria untuk penyampaian usulan sebagai bentuk dukungan terhadap program/kegiatan yang diusulkan.
2. Untuk terus menjamin keberlanjutan terhadap sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.